MULTIFINANCE

JANUARI 2025

PELUANG DAN TANTANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI TAHUN 2025

KILAS

OJK Ajukan Blokir 1.447
Nomor Kontak *Debt Collector* Illegal

PERSPEKTIF

Pembiayaan Alat Berat
Terangkat Kebijakan Penghiliran

MERRY CHRISTMAS

And Happy New Year 2025

DAFTARKAN SEGERA

FEB 2025	DIKLAT/ SEMINAR	UJIAN ONLINE	UJIAN OFFLINE	ASESMEN OFFLINE	TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN
MANAJERIAL (DIKLAT OFFLINE)	11 - 12 FEB 2025	13 FEB 2025	-	dilaksanakan di bulan Maret 2025	03 FEB 2025
MANAJERIAL (FULL ONLINE)	13 - 19 FEB 2025	20 FEB 2025	-	dilaksanakan di bulan Maret 2025	05 FEB 2025
DIREKSI & KOMISARIS	26 FEB 2025 (ENG)	-	-	27 FEB 2025 (IND)	17 FEB 2025

Ujian Sertifikasi Profesi Penagihan dapat dilakukan/dijadwalkan oleh PIC Setiap hari Senin s/d Sabtu pkl 08.00-19.00 WIB

#AyoSertifikasi

DAFTAR ISI

FOKUS

7

Peluang dan Tantangan Perusahaan Pembiayaan di Tahun 2025

Industri pembiayaan akan menghadapi banyak tantangan pada 2025, terutama karena potensi kelesuan pasar otomotif, pelemahan permintaan pada objek-objek terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), hingga tren daya beli masyarakat yang masih tertahan.

6 SAMBUTAN

Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI

Menjaga Bisnis Pembiayaan Tetap Berkelanjutan

11 PROFIL

Pemenang Perusahaan Pembiayaan Terbaik APPI 2024 untuk kategori Perusahaan Pembiayaan dengan aset diatas Rp 5 Triliun

- Memberikan Pengalaman yang Luar Biasa
PT BCA FINANCE
- Mengembangkan Produk Sesuai Kebutuhan Pasar
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
- Inisiatif yang Menjaga Bisnis Tumbuh Sehat
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

18 MAJU BERKAT PEMBIAYAAN

- **Karyanti** : Pengusaha Katering dan Warung Angkringan Debitur Mega Auto Finance
Sukses Putar Haluan Bisnis Berkat Layanan Pembiayaan
- **Aditya Warnik** : Pengusaha Bakso dan Es Doger Debitur Federal International Finance
Kala Pembiayaan Jadi Teman Beli Motor Pertama hingga Punya Kedai Perdana

20 KILAS

- OJK Ajukan Blokir 1.447 Nomor Kontak *Debt Collector* Ilegal
- Kebijakan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Masih Digodog Pemerintah
- Penjualan Sepeda Motor Tembus 5,41 Juta Unit
- Penjualan Mobil Lesu

23 PERSPEKTIF

- Pembiayaan Alat Berat Terangkat Kebijakan Penghiliran
- Napas Tambahan Bisnis Mobil *Hybrid*
- Paket Ekonomi Pemantik Daya Beli

29 FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)

30 KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

55 DAFTAR ANGGOTA APPI

Dapatkan Souvenir menarik dari APPI bagi yang menuliskan artikel dalam majalah *Multifinance*. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai informasi ini, dapat menghubungi Sekretariat APPI di Telp. (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

Arah Kebijakan Pembiayaan

Awal Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan dialog dengan pelaku industri jasa keuangan. Dari pertemuan tersebut, secara garis besar bagaimana arah kebijakan OJK ke depan untuk menumbuhkan bisnis pembiayaan?

Heru Purnomo,
Magelang

Dari paparan Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar, sangat mengapresiasi atas komunikasi yang terjalin dengan baik dan masukan industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai kesempatan.

Kontribusi sektor jasa keuangan diharapkan tidak terbatas pada pencapaian angka pertumbuhan yang baik, namun juga dibutuhkan langkah konkret industri jasa keuangan untuk mendukung program pemerintah meliputi inisiatif perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai supporting ecosystem Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi green finance dan dukungan pengembangan skema/instrumen keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi dan mendukung program 3 juta rumah tiap tahun.

Sektor Tumbuh Tahun Ini

Sepanjang 2024, tumpuan bisnis pembiayaan yakni penjualan kendaraan bermotor belum sepenuhnya pulih. Barangkali ada ulasan khusus untuk mengupas prospek industri apa saja yang berpeluang tumbuh pada 2025?

Agustina Yustanti,
Utah Kayu

Kami akan pertimbangan masukan ini. Terima kasih

Pemimpin Umum:
Suwandi Wiratno

Penanggung Jawab:
Sigit Sembodo
Rosalina Dhanudimuljo
Gusti Wira Susanto
I Dewa Made Susila
Agus Prayitno Wirawan
Ristiawan Suherman
Harjanto Tjitohardjojo
Iwan Setiawan
Yap Tjay Hing
Ikuo Sugiyama
Primartono Gunawan
William Francis Indra

Pemimpin Redaksi:
Sri Haryati

Sekretaris Redaksi:
Wellyani
Daniel Darmadi

Sirkulasi/Distribusi:
Sekretariat APPI

ALAMAT REDAKSI:
Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka)
Tower A Lantai 7 Unit D
email: sekretariat@ifsa.or.id
website: www.appi.id
Telp: 021-2982 0190
Fax: 021-2982 0191

Menjaga Bisnis Pembiayaan Tetap Berkelanjutan

Pelaku industri pembiayaan memilih target moderat pada 2025. Dinamika global yang masih diselimuti ketidakpastian, tentu menjadi pertimbangan agar tetap menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian.

Akan tetapi, kabar baik yang datang dari dalam negeri, seperti kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya diberlakukan untuk produk-produk mewah, memberi sentimen positif. Setidaknya, bisnis otomotif masih akan memiliki amunisi untuk meningkatkan penjualan.

Tantangan industri otomotif, lebih kepada kebijakan opsen pajak di daerah. Terkait dengan opsen pajak ini, kebijakannya memang akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Namun, jika implementasinya tidak terukur, bisa memberi efek negatif terhadap prospek penjualan kendaraan bermotor pada tahun ini.

Melihat data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejatinya bisnis pembiayaan pada 2024 masih bisa mencatat pertumbuhan positif. Setidaknya hingga Oktober 2024, pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 8,37% *year-on-year* (YoY).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Oktober 2023 yang tumbuh 15,02% YoY, angka pertumbuhannya memang cenderung lambat. Namun, pertumbuhan pada 2024 berlangsung di tengah daya beli masyarakat yang lemah.

Selain itu, target penjualan otomotif khususnya mobil pada 2024, tak secepat tahun sebelumnya. Artinya, di saat pelambatan ekonomi di dalam negeri, bisnis pembiayaan masih mampu mencatatkan angka pertumbuhan. Tentu ini menjadi kabar baik tersendiri.

Memasuki 2025, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berharap pelaku industri pembiayaan konsisten menjaga performa bisnisnya. Banyak ruang yang masih bisa disasar.

Berbagai insentif pemerintah dan bank sentral, khususnya di sektor hunian dan kendaraan bermotor, diharapkan mampu memacu minat masyarakat

Suwandi Wiratno,
Ketua Umum
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

untuk kembali mengakses pembiayaan, berbelanja, dan lain sebagainya.

Pada 2024, APPI juga kembali memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan yang dinilai memiliki performa bisnis yang baik.

Selain itu, terdapat pula penghargaan terhadap para pelanggan setia di beberapa perusahaan pembiayaan, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau pelaku usaha perorangan yang punya dampak nyata bagi sekitarnya, karena bisa memanfaatkan layanan perusahaan pembiayaan untuk naik kelas atau ekspansi bisnis.

Dengan penghargaan ini, kami berharap dapat memberikan semangat bagi para pemangku kepentingan di industri pembiayaan dalam menyuguhkan inovasi terbaik bagi perusahaannya masing-masing, sehingga pada akhirnya mampu menambah pengaruh industri pembiayaan terhadap aktivitas perekonomian di Tanah Air.

APPI tetap berkomitmen untuk menjaga ekosistem industri pembiayaan yang sudah tumbuh dengan baik, mampu meningkatkan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Banyak layanan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan, langsung berhubungan dengan masyarakat, pelaku UMKM, dan aktivitas produktif lainnya.

Layanan ini yang akan terus kami tingkatkan supaya keberadaan industri pembiayaan benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses keuangan melalui institusi formal keuangan. (*)

Peluang dan Tantangan Perusahaan Pembiayaan di Tahun 2025

JAKARTA — Industri pembiayaan akan menghadapi banyak tantangan pada 2025, terutama karena potensi kelesuan pasar otomotif, pelemahan permintaan pada objek-objek terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), hingga tren daya beli masyarakat yang masih tertahan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa setiap perusahaan pembiayaan harus bersiap menatap ruang pertumbuhan piutang yang lebih terbatas di sepanjang 2025.

"Pada 2025 sangat bergantung kondisi sektor otomotif dan beberapa industri terkait objek pembiayaan. Tadinya, kami coba proyeksikan sama dengan pertumbuhan pada 2024. Tapi karena banyak dinamika baru di akhir tahun 2024, mungkin hanya bisa tumbuh di antara 6% sampai 8%," jelasnya.

Sebelumnya, APPI memproyeksi pertumbuhan piutang pembiayaan sepanjang 2024 bisa mencapai 10% sampai 12%. Namun, fenomena lesunya

penjualan mobil dan sepeda motor mempengaruhi ruang pertumbuhan, sehingga peluang pertumbuhan menuju lebih moderat ke kisaran 8% sampai 10%.

"Contoh, 2024 target penjualan mobil dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) diturunkan dari 1 juta ke 850.000 unit saja. Pada 2025, targetnya bahkan semakin pesimistis ke 600.000—700.000 unit. Ini pasti sangat berpengaruh ke industri pembiayaan," katanya.

Suwandi menjelaskan beberapa sentimen negatif buat sektor otomotif, antara lain karena dampak PPN 12% untuk beberapa tipe mobil dan sepeda motor, serta dampak penerapan opsen pajak yang berpotensi mengerek harga jual karena perubahan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa daerah.

Namun, di balik tren lesu di beberapa sektor, Indonesia tetap menyimpan potensi besar dari

sisi pertumbuhan ekonomi, sehingga industri pembiayaan tetap akan menarik buat investor maupun pendana.

"Indonesia menarik dari sisi demografi. Jumlah penduduk produktif banyak. Jadi tinggal melihat bagaimana upaya pemerintah bisa meningkatkan pendapatan per kapita secara umum, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman optimistis bahwa industri pembiayaan masih akan bertumbuh kuat.

Hal ini tercermin dari kinerja piutang pembiayaan mencapai Rp501,78 triliun sampai September 2024, atau tumbuh 9,39% secara tahunan (*year-on-year/ YoY*). Laba industri pembiayaan sebesar Rp16,97 triliun per September 2024 pun masih tumbuh 0,84% yoy.

"Akhir tahun ini saya yakin masih ada peluang dari Desember *effect*, sehingga akumulasi pertumbuhan 2024 masih bisa lebih dari 10%. Saya yakin tahun 2025 pun sama, karena selain perbankan, industri keuangan yang kuat adalah perusahaan pembiayaan. Industri ini berperan membuat ekonomi nasional

ikut maju dengan menangkap peluang-peluang yang ada," jelasnya ketika membuka APPI Award.

Selain Agusman, turut hadir Pendiri dan Chairman Arista Group Hartono Sohor yang memberikan pemaparan tentang potensi kendaraan listrik (EV) pada 2025.

Sekadar info, kendati penjualan mobil baru 2024 sedang lesu, jaringan *dealer* kendaraan dan ekosistem industri otomotif Arista Group tetap mampu bertumbuh 35% secara tahunan, berkat kontribusi EV.

"Pertumbuhan ini dari mobil listrik, karena semester II/2024 luar biasa. Bahkan, sekarang [porsi] penjualan Arista itu 60%—65% merupakan kontribusi EV. Semester I/2024 waktu EV masih 3% dari total penjualan, saya bilang sampai akhir 2024 pasti 6%—7% dan betul ternyata, sekarang sudah di kisaran itu. Memasuki 2025, pasti meningkat lagi," jelasnya.

Hartono pun mengakui bahwa dua merek asal China, yaitu Wuling dan BYD, merupakan kontributor utama terhadap kinerja tersebut.

Sekadar info, saat ini Arista Group merupakan salah satu *dealer* unggulan bagi beberapa pabrikan EV. Selain Wuling dan BYD, *dealer* yang berdiri sejak

2003 ini juga memegang layanan penjualan Honda, Neta, Suzuki, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Hyundai, Hino, dan Yamaha.

"Wuling dan BYD, kebetulan saat ini [peringkat] satu dan dua penjualan EV di Indonesia. Bahkan, dua bulan terakhir, dua merek ini 80% dari total EV," ungkapnya.

Pria yang mengawali karier sebagai *sales* mobil dan motor sebelum akhirnya sukses memiliki *dealer* sendiri ini menggambarkan bahwa pertumbuhan bisnisnya di EV sebenarnya tak berdiri sendiri, melainkan berkah efek domino atas upaya banyak pihak yang terus mendukung penetrasi EV di Indonesia.

Mulai dari pemerintah, para pabrikan, para pemain ekosistem infrastruktur EV, termasuk perusahaan pembiayaan yang mendukung industri otomotif lewat aktivitas pembiayaan.

"Dulu, awal-awal EV, memang 90% [penjualan] masih tunai. Tapi karena sekarang perusahaan pembiayaan sudah banyak berpartisipasi, saat ini di kami sudah sekitar 70% penjualan pakai kredit," ungkapnya.

Selain itu, pada APPI Award pula kali ini memberikan penghargaan kepada "Perusahaan Pembiayaan Terbaik" terhadap 140 perusahaan pembiayaan anggota APPI, diambil dari laporan keuangan publikasi perusahaan tahun buku 2023.

Perusahaan terbaik dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelompok perusahaan pembiayaan dengan aset di bawah Rp1 triliun, aset di antara Rp1 triliun - Rp5 triliun, dan aset di atas Rp5 triliun.

Pemenang perusahaan pembiayaan terbaik dengan total aset di bawah Rp1 triliun diraih oleh Astra Multi Finance (Juara 1), Asiatic Sejahtera Finance (Juara 2), dan Trust Finance Indonesia (Juara 3).

Kemudian untuk kategori kedua, pemenang perusahaan pembiayaan terbaik dengan total aset antara Rp 1 triliun - Rp 5 triliun diraih oleh Kredivo Finance Indonesia (Juara 1), Sarana Global Finance Indonesia (Juara 2), dan Hasjrat Multifinance (Juara 3).

Terakhir, untuk kategori perusahaan pembiayaan terbaik dengan total aset di atas Rp 5 triliun adalah BCA Finance (Juara 1), Federal International Finance (Juara 2), dan CIMB Niaga Auto Finance (Juara 3). (*)

Asuransi Cakrawala Proteksi

"a dedication to offer a peace of mind . . ."

Property Insurance

Motor Vehicle Insurance

Cargo Insurance

BELI ASURANSI ONLINE? BERSAMA ACP SEKARANG BISA DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA

Buktikan sendiri di www.cakrawalaproteksi.com

Head Office :

Citra Towers, 9th Floor

Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Jakarta Pusat 10610

Tel : +62 21 - 3971 6789 | Fax : +62 21 - 3973 6868

Branch Offices :

- Medan • Pekanbaru • Bengkulu • Batam • Jambi • Pangkal Pinang • Palembang • Lampung •
- Bandung • Bogor • Karawang • Kelapa Gading • Alam Sutera • Cilegon • Semarang •
- Cirebon • Purwokerto • Yogyakarta • Solo • Tegal • Malang • Surabaya • Jember • Bali •
- Lombok • Pontianak • Palangkaraya • Banjarmasin • Samarinda • Manado •
- Palu • Kendari • Makassar • Parepare • Balikpapan • Kediri • Pakubuwono •

PT. ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA
BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

LAYANAN KLAIM

24/7 021-5313-2777
0858-3333-3175

Roni Haslim,
Presiden Direktur PT BCA Finance

Juara 1
Perusahaan Pembiayaan Terbaik APPI 2024
untuk kategori Perusahaan Pembiayaan
dengan aset diatas Rp 5 Triliun

PT BCA FINANCE

Memberikan Pengalaman yang Luar Biasa

Sebagai perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, inovasi menjadi aspek yang terus dikembangkan untuk mendukung kinerja bisnis. Pengembangan digital terus dilakukan perusahaan secara berkelanjutan baik di area pemasaran, layanan maupun proses kerja internal.

Layanan digital yang sudah bisa dinikmati konsumen selama ini terus dikembangkan untuk meningkatkan *customer experience*. Kami meyakini pengembangan teknologi yang baik akan menciptakan keunggulan yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

Perusahaan juga terus mengajak semua komponen di internal agar beradaptasi dengan bisnis dan perubahan.

Oleh sebab itu, perusahaan secara kontinyu melakukan sosialisasi menggunakan media-media internal perusahaan mengenai inovasi dalam pemanfaatan teknologi, serta melakukan internalisasi mulai dari *top* manajemen sampai ke

level bawah, melalui ajang kompetisi inovasi dan *improvement*.

Dari sisi kinerja, BCA Finance melakukan penggabungan bisnis milik BCA Multi Finance yang efektif per 1 September 2024. Dengan masuknya BCA Multi Finance ke ekosistem BCA Finance, diharapkan dapat menyatukan potensi terbaik layanan pembiayaan di Group BCA, untuk menghasilkan suatu entitas baru yang lebih kokoh, unggul, efisien, dan efektif.

Dengan demikian, kami dari BCA Finance mampu fokus sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil) dan roda dua (sepeda motor).

TUMBUH POSITIF

Dari sisi kinerja, secara umum pada 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif sampai dengan kuartal ketiga, di tengah kondisi ekonomi dan industri yang kurang mendukung.

Dari sisi bisnis, perusahaan telah membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023, di mana kenaikan tersebut juga turut meningkatkan total aset kelolaan perusahaan.

Kualitas pembiayaan perusahaan pada 2024 masih dalam tingkat yang terkendali. Hal ini sesuai dengan strategi perusahaan dalam upaya peningkatan bisnis dan pengelolaan kualitas pembiayaan.

Dalam menjalankan bisnis, kami menerapkan strategi antara lain, *competitive price* yang didukung oleh struktur pendanaan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif. Perusahaan selalu memfokuskan diri pada penyediaan dana pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif.

Selanjutnya, *operational excellence* menjadi strategi dalam upaya meningkatkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi biaya. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa pengelolaan biaya operasional juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat suku bunga untuk tetap sangat kompetitif.

Dengan operasional bisnis yang *excellence/* andal, seluruh *stakeholder* dan konsumen merasa

puas, produktivitas dan efektivitas tinggi, sehingga biaya menjadi sangat efisien dan pada akhirnya akan sangat menopang strategi *competitive price* yang dijalankan.

Strategi selanjutnya yakni *prudent acquisition*. Hal yang dilakukan yakni melakukan analisis calon konsumen yang mendalam dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan *database*.

Penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sejak analisa portofolio, analisa calon konsumen, keputusan komite kredit, hingga pemilihan *channel* yang berkualitas.

Kemudian kami juga membangun *mutual relationship* dengan pihak terkait dalam menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan menyadari bahwa pertumbuhan yang telah terjadi selama ini bukan semata-mata hasil dari perusahaan sendiri tetapi merupakan hasil dan dukungan dari seluruh *stakeholder*, mitra usaha, dan konsumen.

Terakhir yakni *excellent customer experience through digital process*. Dengan strategi ini perusahaan senantiasa berusaha memberikan pengalaman yang luar biasa kepada seluruh konsumen melalui proses digital di perusahaan, sehingga kebutuhan konsumen akan pembiayaan dapat terpenuhi dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Untuk menjembatani kebutuhan komunikasi antara konsumen, perusahaan menyediakan layanan *Call Center* Halo BCA 1500888, Email customercarebcaf@bcaf.id, WA *Chatbot* 0811-1027-780, *Website* <https://bcafinance.co.id>, *Mobile Apps* *FinA*, *Video Call* *AVA*, dan kantor cabang BCA Finance terdekat.

Dengan adanya jembatan komunikasi itu, berdasarkan indikator yang ada, sebagian besar konsumen memberikan respons puas terhadap layanan yang diberikan perusahaan.

Ke depan, kami akan menjalankan sejumlah upaya untuk menjaga layanan ke depan dengan strategi meningkatkan kualitas layanan dengan fokus pemantauan berkelanjutan melalui evaluasi dan monitoring rutin untuk memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga.

Lalu, pelatihan karyawan dengan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan berkala agar mereka mampu

memberikan layanan yang prima, dan meningkatkan infrastruktur melalui memastikan fasilitas dan teknologi pendukung layanan selalu dalam kondisi optimal.

Aspek fokus kepada konsumen, kami berupaya untuk mendengar masukan, melakukan survei, *review*, *FGD*, dan *feedback* untuk memahami kebutuhan serta harapan konsumen.

Dari sisi personalisasi layanan, kami sesuaikan layanan berdasarkan preferensi konsumen untuk menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan.

Kemudian mengupayakan respons cepat dengan menangani keluhan dan pertanyaan konsumen dengan respons yang cepat dan solusi yang efektif.

Upaya menjaga layanan dan pengembangan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dengan automasi layanan. Menerapkan teknologi seperti *Chatbot*, *Mobile Apps*, *Web* atau sistem otomatis lainnya untuk meningkatkan efisiensi. Lalu, *elektronik-doc* untuk transformasi dokumen dan *form* layanan konsumen menjadi *e-doc/e-form*.

Dari sisi upaya menjalin relasi dengan konsumen, kami terus menjalin komunikasi yang transparan. Kami melakukan pembaruan informasi dengan menyampaikan informasi secara berkesinambungan kepada konsumen terkait perubahan atau pembaruan layanan.

Kami juga melakukan edukasi konsumen dengan penyampaian edukasi tentang fitur layanan agar konsumen memahami cara memanfaatkannya dengan maksimal.

Ke depan, kami sangat menyadari tantangan bisnis. Namun, untuk tetap menjaga kelangsungan usaha kami mengantisipasi beberapa hal di antaranya krisis ekonomi global yang dapat berdampak kepada perekonomian nasional yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.

Kami juga melihat kompetisi yang meningkat, serta stagnasi pertumbuhan penjualan mobil mendorong persaingan yang lebih ketat. Hal lain yakni tingkat kesulitan yang makin tinggi dalam penagihan dan pengamanan jaminan.

Kami percaya tantangan tersebut dapat diatasi dengan berbagai inovasi yang telah dan akan terus kami kembangkan. (*)

Siswadi,
Presiden Direktur PT Federal
International Finance

Juara 2
Perusahaan Pembiayaan Terbaik APPI 2024
untuk kategori Perusahaan Pembiayaan
dengan aset diatas Rp 5 Triliun

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Mengembangkan Produk Sesuai Kebutuhan Pasar

Kami terus berinovasi dalam pengembangan layanan digitalisasi untuk mempermudah akses pembiayaan bagi debitur. Salah satu langkah FIGROUP untuk terus membangun dan mengembangkan ekosistem digital adalah dengan membuat sebuah layanan debitur berbasis *artificial intelligence*, yaitu FIONA (FIGROUP *Intelligence Personal Assistant*).

Selain itu, melalui aplikasi FIGROUP Mobile Customer (FMC), perusahaan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan aman. Aplikasi ini sangat berguna untuk memantau informasi terkini seputar FIGROUP, status kontrak pembiayaan, dan berbagai layanan lainnya.

Dari sisi adaptasi bisnis dengan pemanfaatan teknologi, kami aktif mengadakan pelatihan dan *workshop* untuk karyawan, salah satunya melalui program *Monthly Business Clinic* (MOBIC). Program ini menghadirkan berbagai topik yang

berbeda setiap bulannya, disesuaikan dengan isu terkini dan kebutuhan karyawan, seperti literasi teknologi, pengembangan *soft skills*, dan optimalisasi proses kerja.

Hal ini bertujuan mengajak karyawan agar dapat lebih adaptif terhadap perubahan industri yang dinamis serta memberikan kontribusi optimal dalam pengembangan bisnis perusahaan.

Sepanjang 2024, PT Federal International Finance (FIF), anak perusahaan PT Astra International Tbk. dan bagian dari Astra Financial, mencatat laba bersih sebesar Rp3,3 triliun pada periode Januari hingga September 2024 atau sampai dengan kuartal III/2024.

Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 8,8% *year-on-year* (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023, dengan laba bersih sebesar Rp3 triliun.

Peningkatan kinerja PT FIF tercermin dalam nilai penyaluran pembiayaan yang mencapai Rp34,1 triliun hingga akhir kuartal/III 2024 meningkat 7,1% YoY. Peningkatan ini juga selaras dengan kenaikan jumlah unit yang dibiayai, yang mencapai 2,4 juta unit, naik 1,4% YoY.

Kami membukukan peningkatan *net-service asset* sebesar 14,6% YoY menjadi Rp44,9 triliun hingga kuartal III/2024.

Dalam menjalankan bisnis, semua insan FIGROUP berpegang pada filosofi Catur Dharma Astra, yakni Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara, Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan, Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama, serta Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik. Filosofi tersebut kemudian diturunkan kepada nilai-nilai perusahaan melalui T.E.A.M (*Teamwork, Excellence, Achieving dan Moving Forward*).

FIGROUP juga melaksanakan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Melalui prinsip ini memastikan bahwa setiap proses bisnis dijalankan secara etis, sesuai peraturan yang berlaku, dan mendukung keberlanjutan usaha.

Sebagai upaya mendukung implementasi keberlanjutan (*sustainability*) yang sejalan dengan misi perusahaan, yaitu Membawa Kehidupan

FIFGROUP juga melaksanakan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

— **Siswadi,**
Presiden Direktur PT Federal
International Finance

yang Lebih Baik untuk Masyarakat, perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan mengacu kepada *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Inisiatif itu dikemas dalam bentuk *Sustainability Framework* yang mengintegrasikan program keberlanjutan ke dalam *Strategy Triple-P Roadmap*, yaitu *Portfolio, People, dan Public Contribution*

Dalam upaya menjembatani kebutuhan antara perusahaan dengan debitur, FIFGROUP mempunyai layanan 24 jam yang siap membantu debitur kapan pun, di mana pun.

Kami mengembangkan *FIFGROUP Intelligence Personal Assistant* (FIONA) yang merupakan *virtual contact center* yang dikembangkan oleh FIFGROUP untuk menjawab segala pertanyaan maupun keluhan debitur.

Tidak hanya informasi, debitur dan calon debitur juga bisa mengajukan keluhan terhadap layanan FIFGROUP melalui FIONA.

Dengan adanya layanan yang kami kembangkan tersebut, terlihat respons debitur

sangat positif, tercermin dari salah satu kisah inspiratif debitur yang memenangkan Maju Berkat Pembiayaan APPI seperti Ibu Aditya Warnik yang berhasil mengembangkan bisnisnya dengan dukungan pembiayaan dari FIFGROUP.

Selain itu, FIFGROUP juga mempertahankan rasio *nonperforming finance* (NPF) di level 0,02% pada kuartal III/2024.

Dengan berbagai capaian ini dan apresiasi ini, kami akan terus berupaya mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan meningkatkan pengalaman debitur melalui pendekatan yang lebih personal dan efisien.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi.

Kami juga terus mencermati dinamika yang berkembang, menghadapi beragam tantangan meliputi perkembangan teknologi yang cepat, perubahan regulasi, serta dinamika kebutuhan debitur. (*)

Juara 3

Perusahaan Pembiayaan Terbaik APPI 2024
untuk kategori Perusahaan Pembiayaan
dengan aset diatas Rp 5 Triliun

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

Inisiatif yang Menjaga Bisnis Tumbuh Sehat

Sebagai perusahaan pembiayaan yang dituntut untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan dan inovasi, PT CIMB Niaga Auto Finance mengedepankan digitalisasi dalam proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan penyederhanaan proses dokumen menjadi lebih mudah, cepat dan efisien.

Kami telah melakukan berbagai inovasi digital, seperti *Digital Customer Service*, *Geotagging*, *Digital Signature*, serta penambahan fitur di CNAF Mobile.

Selain itu, kami juga telah menginisiasi penggunaan teknologi telepon yang menggunakan suara robot sebagai alat untuk memberi pesan pengingat bagi debitur dalam melakukan pembayaran angsuran.

Berbagai inisiatif berbasis teknologi semakin gencar dijalankan sepanjang 2024. Kami menyadari bahwa dengan modal sumber daya manusia yang andal dan cakap di bidangnya, adaptasi teknologi dapat dilakukan dengan sangat cepat sehingga proses bisnis yang kami jalankan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan beragam inisiatif, secara kinerja bisnis kami berhasil membukukan perolehan aset sebesar Rp8,86 triliun sampai dengan November 2024, tumbuh sebesar 4% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebesar Rp8,49 triliun.

Total aset kelolaan mencapai Rp12,74 triliun atau tumbuh 17% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp10,86 triliun dengan total ekuitas Rp2,38 triliun.

Selain perolehan aset sampai dengan November tahun 2024, kami mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan

Ristiawan Suherman,
Presiden Direktur PT CIMB
Niaga Auto Finance

baru sebesar 11% menjadi Rp8,79 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya Rp7,92 triliun.

Pertumbuhan ini didukung kontribusi pada dua segmen utama CNAF yaitu pembiayaan mobil bekas sebesar 64% dan pembiayaan mobil baru sebesar 25%.

Selain fokus pada tren bisnis yang kompetitif pada 2024, CIMB Niaga Finance juga melakukan pengembangan pembiayaan ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan di CIMB Niaga Finance sampai November 2024 yang mencapai Rp635 miliar atau tumbuh 130% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp276 miliar.

Dari sisi capaian laba, kami mampu mencatatkan pertumbuhan laba sebelum pajak (PBT) sebesar Rp516 miliar atau tumbuh 6,3% pada November 2024 jika dibandingkan dengan bulan November 2023 sebesar Rp485 miliar.

Di sisi lain, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada November 2024 juga sangat terjaga yakni 1,33%. Angka ini tentu saja tergolong kecil jika dibandingkan rata-rata industri pada September 2024 sebesar 2,62%.

Dalam menjalankan roda bisnis guna menggapai sasaran pertumbuhan, kami terus berupaya menjaga kesehatan portofolio, salah satunya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko berupa penguatan

know your customer (KYC), serta mengedepankan metode *risk based pricing* penentuan bunga berdasarkan tingkat risiko debitur.

Inisiatif tersebut dijalankan untuk tetap menjaga kinerja perusahaan agar tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Kami juga senantiasa menjaga pondasi perusahaan dengan membangun budaya kerja yang berkesinambungan serta mengedepankan kepuasan seluruh debitur dengan mengedepankan nilai-nilai perusahaan CNAF yaitu EPICC.

EPICC memiliki makna sebagai berikut, *Enabling Talent* yaitu komitmen CNAF untuk memberdayakan dan mengembangkan setiap karyawan serta berupaya menjadi tempat terbaik bagi talenta terbaik dalam berkarya.

Passion yaitu sikap semua karyawan memberikan yang terbaik atas segala hal yang kita lakukan dan mencapai hasil yang maksimal.

Integrity & Accountability yaitu komitmen semua karyawan bertindak sesuai etika/norma, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.

Collaboration yaitu komitmen semua karyawan dalam mengutamakan kesuksesan tim di atas individu, karena kesuksesan CIMB Niaga Finance adalah kesuksesan bersama juga.

Customer Centricity yaitu tekad perusahaan mengutamakan debitur dan selalu bertindak dengan benar bagi debitur.

Dengan menjunjung tinggi budaya kerja serta nilai-nilai perusahaan tersebut, kami berupaya dengan sekuat tenaga untuk memberikan layanan terbaik kepada debitur dan membangun komunikasi yang baik dengan debitur.

Kami terus berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang memberikan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, melalui pelayanan yang terbaik kepada debitur. Kami memiliki layanan *customer service* yang dapat menjadi wadah komunikasi antara debitur dengan perusahaan yaitu *Digital Customer Service* yang tersedia di seluruh cabang CNAF.

Layanan *Digital Customer Service* CNAF berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kepada debitur dengan cepat dan mudah. Serta, dapat menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan bahkan keluhan debitur kepada CNAF.

Selain itu, debitur juga dapat berkomunikasi melalui jalur sosial media sehingga hal ini dapat menjadi opsi tambahan untuk *channel* komunikasi dengan debitur.

CNAF menerapkan sejumlah upaya strategis untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan debitur dan memelihara relasi yang kokoh dengan debitur.

Upaya-upaya tersebut mencakup peningkatan dan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), kejelasan informasi produk dan keamanan data debitur, penyediaan sarana pengaduan. Pada 2023 CNAF telah menerima total 469 keluhan debitur dengan tingkat penyelesaian penuh 100%.

Selain itu, CNAF juga menggunakan pendekatan NPS (*Net Promotor Scoring*) untuk mengukur loyalitas debitur CNAF.

Sejak 2022, angka NPS CNAF yaitu 31%, naik 18% pada tahun 2023 menjadi 49%. Pencapaian CNAF tersebut, menunjukkan komitmen CNAF untuk selalu melakukan perbaikan atau *improvement* dalam proses bisnis dan layanan yang diberikan untuk kepuasan debitur.

Sementara itu guna menghadapi prospek 2025, kami tetap berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang memberikan solusi pembiayaan terintegrasi bagi masyarakat. Berbagai inisiatif tengah dilakukan CNAF untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, kami mengakui tantangan ke depan tidak mudah. Kenaikan pajak yang saat ini diwacanakan akan mulai diberlakukan pada 2025, tentu menjadi satu hal yang mesti dihadapi.

Kami melihat 2025 masih cukup menantang, daya beli masyarakat diprediksi masih belum pulih seutuhnya terlebih ditambah dengan kenaikan pajak yang pastinya akan turut berdampak ke harga unit yang naik sehingga berpengaruh ke besaran angsuran debitur.

Kendati demikian, kami masih optimis dapat menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp9,5 triliun pada 2025. Kami tetap optimis dapat terus meningkatkan penyaluran pembiayaan baru di setiap segmennya, selain dari otomotif kami juga akan mendorong penyaluran pembiayaan multiguna yang dapat diperuntukan pada konsumsi produktif, konsumtif, investasi dan modal kerja. (*)

Manfaatkan Fitur Baru

Perpanjangan Polis

Di Aplikasi Asuransi Sinar Mas Online

Nikmati kemudahan perpanjangan Polis Asuransi langsung dari Aplikasi **Asuransi Sinar Mas Online**. Dapatkan Panduan Lengkap Fitur Perpanjangan Polis dengan Memindai QR Code di Bawah Ini:

Panduan Fitur Perpanjangan Polis

bit.ly/3tUorqN

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengelola Polis Asuransi Anda.

*Segera perpanjang Polis Anda melalui Aplikasi
Asuransi Sinar Mas Online!*

Download Aplikasi
Asuransi Sinar Mas Online
dan Manfaatkan Kemudahannya.
#BikinJadiAman

PT. ASURANSI SINAR MAS
Plaza Simas; Jl KH Fachrudin No 18, Jakarta Pusat 10250
24 Hour Customer Care (021) 23567888 / 5050 7888
WhatsApp 02180600691

www.sinarmas.co.id

ASURANSI SINAR MAS OFFICIAL ASURANSISINARMASOFFICIAL

ASURANSI SINAR MAS AS_SINARMAS ASURANSISINARMASOFFICIAL

Karyanti

Pengusaha Katering
dan Warung Angkringan
Debitur Mega Auto Finance

Sukses Putar Haluan Bisnis Berkat Layanan Pembiayaan

JAKARTA — Setiap pelaku usaha pasti pernah merasakan kondisi bisnisnya terpuruk, bahkan dipaksa putar haluan di tengah jalan. Tak terkecuali Karyanti, pebisnis katering asal Semarang, Jawa Tengah yang merasakan betul momen peralihan itu di era pandemi Covid-19.

Siapa sangka, layanan pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci pelecut semangat Karyanti untuk bangkit kembali, hingga kini sukses diganjar sebagai salah satu debitur penerima penghargaan Maju Berkat Pembiayaan pada 2024 dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Karyanti bercerita bahwa sebelumnya dirinya hanya menjalankan usaha berdagang pakaian, sepatu, dan perabotan secara keliling. Demi kelancaran usaha, Karyanti pun berkenalan dengan Mega Auto Finance pada 2018 dalam rangka mengambil pembiayaan sepeda motor.

"Waktu itu teman yang memperkenalkan, karena saya butuh yang prosesnya mudah dan bisa cepat. Lumayan, buat membantu perekonomian keluarga. Tapi belum sempat lunas, usaha saya dagang keliling itu terpukul karena pandemi Covid-19. Cicilan saya di Mega Auto Finance bahkan sempat berstatus macet," ungkapnya.

Kondisi serba sulit itu rupanya tak menjadi penghalang Karyanti dan suami untuk tetap menjaga itikad baik dengan Mega Auto Finance, yakni lewat komitmen kuat akan mulai mencicil kembali sesuai kemampuan, saat perekonomian keluarga mulai membaik.

Pada fase itu, Karyanti sampai-sampai harus ikut orang untuk menjadi pekerja serabutan di mana-mana, salah satunya di rumah makan. Beruntung, di balik masa-masa sulit, justru muncul inspirasi baru bagi Karyanti, yakni terbukanya peluang dan potensi menjadikan bisnis kuliner sebagai tumpuan melangkah ke kehidupan yang lebih baik.

"Kondisi itu membuat saya putar otak dan mencari peluang-peluang baru. Saya pun memberanikan diri buka jasa katering kecil-kecilan, dan coba bikin masakan untuk disetor ke warung-warung angkringan. Alhamdulillah, usaha bidang kuliner saya justru terus berkembang," ujar Karyanti.

Menurutnya, kepercayaan dari Mega Auto Finance juga menjadi salah satu penyemangat untuk mengembangkan bisnis barunya itu. Salah satu contohnya, kendati notabene sempat berstatus debitur macet, Karyanti diberikan akses untuk kembali mengambil sepeda motor anyar demi kelancaran operasional usaha kulinernya.

Alhasil, layanan pembiayaan telah berjasa membantu ekosistem 'Karyanti Katering' terus berkembang hingga mampu mempekerjakan 10 orang karyawan, bahkan ditambah beberapa pekerja lepas saat ramai pesanan.

Secara total, Karyanti mengaku telah mengajukan pembiayaan hingga 13 kali, berbekal aset 3 unit sepeda motor miliknya sebagai agunan. Mulai dari pembiayaan untuk modal, arus kas, sampai investasi peralatan memasak.

"Contoh, pernah ada pesanan 200 boks, tapi arus kas masih mandek di orang yang baru punya hajat dan bayarnya belum lunas. Akhirnya, buat modal beli bahan, layanan pembiayaan jadi solusi. Apalagi prosesnya mudah dan pelayanannya sangat ramah, sudah seperti teman yang mengikuti kisah jatuh-bangun usaha kami," tutupnya. (*)

Aditya Warnik

Pengusaha Bakso dan Es Doger
Debitur Federal International Finance

Kala Pembiayaan Jadi Teman Beli Motor Pertama hingga Punya Kedai Perdana

JAKARTA — Naik kelas menjadi impian bagi setiap pelaku usaha mikro, tak terkecuali Aditya Warnik asal Bukittinggi, Sumatera Barat, yang mengawali bisnisnya dari berdagang bakso dan es doger keliling. Terkini, layanan pembiayaan telah membantu membuka jalannya untuk mencapai impian tersebut.

Wanita kelahiran Jawa Tengah yang jauh-jauh merantau ke Tanah Sumatera untuk berdagang itu awalnya mengandalkan gerobak dorong kecil untuk berjualan dari satu sekolah ke sekolah lainnya.

Akhirnya, untuk memperluas jangkauan penjualan, Aditya pun mengambil motor pertamanya di Federal International Finance (FIFGROUP). Aditya juga menjadi pelanggan setia dengan mengambil beragam cicilan, mulai dari pembiayaan modal usaha, pembelian ponsel, juga berbagai barang elektronik di sana.

"Waktu merintis gerobak dorong, perjuangannya harus bangun dini hari sebelum waktu subuh, mulai belanja dan bersiap, terus pergi ke beberapa sekolah. Kenal dengan FIFGROUP awalnya buat ponsel dan elektronik, kemudian motor buat jualan, dan pinjaman kalau sedang kesusahan modal," ungkapnya.

Seiring bantuan berbagai jenis pembiayaan yang totalnya mencapai 16 kali selama 5 tahun belakangan, FIFGROUP juga menemani Aditya mengembangkan bisnis sampai bisa melakukan

produksi sendiri dan punya kedai sendiri bernama 'Bakso Berkah & Mie Ayam Sak Wajan'.

"Berkat pembiayaan, saya bisa beli mesin penggilingan dan buka tempat penggilingan untuk dijual ke teman-teman pedagang lain. Buat di kios juga alat-alat dapur, freezer, sampai showcase, pun melalui pembiayaan," tambah Aditya.

Dari memiliki motor pertama, sampai membuka kedai perdana, layanan pembiayaan telah membantu Aditya mengembangkan usahanya hingga kini bisa mempekerjakan empat orang karyawan di pasar dan beberapa orang untuk jaga warung.

"Pelayanan pembiayaan yang memudahkan dan tidak perlu waktu lama itu kuncinya. Dalam waktu dekat, pembiayaan juga telah membantu saya untuk membuka kedai bakso lagi di tempat lain, sekaligus coba masuk usaha frozen food," tutupnya. (*)

OJK Ajukan Blokir 1.447 Nomor Kontak *Debt Collector* Ilegal

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengajukan pemblokiran kepada 1.447 nomor kontak yang diduga penagih atau *debt collector* ilegal. Permohonan pemblokiran itu disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pengajuan pemblokiran nomor kontak ilegal itu merupakan bagian dari laporan yang disampaikan kepada masyarakat melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Selain itu, OJK telah menemukan dan melakukan pemblokiran terhadap 2.930 entitas pinjaman daring ilegal periode Januari sampai 30 November 2024.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

“OJK telah menemukan dan menghentikan 2.930 entitas pinjaman *online* [daring] ilegal,” kata Friderica dalam konferensi pers RDK Bulanan Oktober 2024 pada Jumat (13/12/2024).

Dia menuturkan OJK juga telah menemukan dan melakukan pemblokiran terhadap 310 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan

masyarakat.

Selanjutnya, OJK tercatat menerima informasi 228 rekening bank atau *virtual account* yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Permintaan pemblokiran atas nomor-nomor rekening tersebut telah diajukan melalui satuan kerja pengawas bank. Dari aspek layanan konsumen, OJK telah menerima 380.943 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 31.099 pengaduan per 30 November 2024.

“Dari jumlah pengaduan tersebut, 11.901 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.961 dari industri *financial technology*, 6.496 dari perusahaan pembiayaan, 1.322 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya,” katanya.

Sementara itu dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, dari 1 Januari hingga 30 November 2024, OJK telah menerima 15.350 pengaduan terkait entitas ilegal.

“Dari total tersebut, 14.364 pengaduan mengenai pinjaman *online* ilegal dan 986 pengaduan terkait investasi ilegal,” katanya. (*)

Kebijakan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Masih Digodog Pemerintah

JAKARTA — Rencana penerapan implementasi asuransi wajib kendaraan bermotor atau *third party liability* makin menguat setelah regulasi kebijakan itu disebut-sebut sudah masuk pembahasan di Kementerian Keuangan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan, implementasi asuransi TPL ditargetkan akan dijalankan pada semester II/2025.

"Masih satu proses panjang karena hingga saat ini hilalnya untuk peraturan pelaksanaannya kita belum lihat, walaupun *draft*-nya sudah ada di Kementerian Keuangan, di BKF [Badan Kebijakan Fiskal]," kata Budi.

Meski demikian Budi tidak bisa memastikan implementasi asuransi TPL akan dimulai pada 2025. Pemerintah sangat berhati-hati mengambil keputusan agar asuransi wajib TPL tidak memberatkan masyarakat.

"Tampaknya pemerintah sangat berhati-hati untuk kapan kiranya asuransi wajib TPL bisa diimplementasikan, dan tahapan-tahapan seperti apa yang tentunya kami sudah usulkan bagaimana mekanismenya agar sesuai harapan dan tidak mengecewakan masyarakat luas," kata Budi.

Budi menegaskan kesiapan perusahaan asuransi apabila TPL berlaku pada 2025.

Budi juga menyoroti, sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asean yang hingga kini belum menerapkan asuransi wajib TPL. Untuk itu, AAUI berharap asuransi wajib TPL bisa diterapkan pada 2025 nanti.

"Tapi seperti yang saya bilang tadi, ada kekhawatiran pemerintah yang merasa masyarakat bebannya cukup tinggi dan inflasi belum bisa ditekan. Tentu kalau ditanya harapannya, tentu di semester II 2025 sudah di tahap bisa berjalan," pungkasnya. (*)

Penjualan Sepeda Motor Tembus 5,41 Juta Unit

JAKARTA — Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor domestik pada Oktober 2024 sebesar 544.392 unit, sedangkan penjualan ekspor tembus 58.112 unit.

Sementara itu, sepanjang 10 bulan tahun 2024, penjualan domestik sepeda motor tembus 5,41 juta unit, sedangkan AISI menargetkan penjualan sepeda motor sebesar 6,4 juta unit hingga akhir 2024.

Dalam kesempatan sebelumnya, AISI optimistis angka penjualan sepeda motor di Tanah Air bisa mendekati 6,5 juta unit sepanjang 2024.

"Tahun ini kami memprediksi penjualan (sepeda motor) akan mencapai 6,35 hingga 6,45 juta unit, mudah-mudahan 6,5 juta," kata Ketua Umum AISI Johannes Loman pada acara

pembukaan Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 pada Oktober lalu.

Menurutnya peningkatan penjualan sepeda motor terus hingga 2025 yang diproyeksi mencapai 6,7 juta unit.

Dia menjelaskan, kehadiran motor-motor baru dengan teknologi mutakhir dapat merangsang minat masyarakat untuk membeli sepeda motor.

"Untuk memenuhi kebutuhan ini, kami pelaku industri sepeda motor akan terus berinovasi menghadirkan produk dengan teknologi yang semakin canggih, aman, dan ramah lingkungan," ucap Johannes Loman.

Untuk diketahui penjualan sepeda motor di Indonesia pada 2023 mencapai 6,2 juta unit. Skutik menjadi jenis sepeda motor yang terlaris nyaris 90% terjual. (*)

Penjualan Mobil Lesu

JAKARTA — Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat capaian penjualan mobil hingga November 2024 masih menorehkan kinerja lesu dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Mengacu data terbaru Gaikindo, sepanjang Januari—November 2024, total penjualan mobil secara *wholesales* tercatat sebesar 784.788 unit atau turun 14,7% *year-on-year* (YoY) dari periode sama 2023 sebesar 920.518 unit.

Sementara itu, penjualan ritel juga turun 11,2% YoY menjadi 806.721 unit pada periode 11 bulan 2024, dibandingkan dengan 908.473 unit pada periode yang sama 2023.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto mengatakan pihaknya berharap penjualan mobil sampai akhir 2024 dapat menyentuh 850.000 unit. Angka tersebut telah direvisi dari sebelumnya sebesar 1,1 juta unit pada 2024.

"Kami harapkan sampai akhir tahun angka penjualan mobil bisa mencapai 850.000 unit," ujar Jongkie.

Kendati demikian, Gaikindo juga mengkhawatirkan dampak opsen pajak hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 yang berisiko menekan industri otomotif. Terlebih, pemerintah juga menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%.

"Memang pada 2025 akan ada kenaikan PPN, Opsi Pajak, UMP dan lain-lain. Kami perkiraan akan semakin sulit untuk mendapatkan angka-angka penjualan yang baik," lanjutnya.

Perlu diketahui, opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Nantinya pemerintah kabupaten/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Adapun, ditilik secara terperinci, penjualan mobil secara *wholesales* di Indonesia sebanyak 74.347 unit pada November 2024. Angka itu ambles 11,9% secara YoY dibandingkan dengan capaian November 2023 sebesar 84.390 unit.

Sementara itu, angka penjualan mobil secara ritel atau dari diler ke konsumen sebesar 76.053 unit pada November 2024, atau melemah 8,1% YoY dibandingkan November 2023 sebanyak 82.781 unit.

Secara bulanan, penjualan mobil juga mengalami penurunan. Misalnya, secara *wholesales* turun 3,7% dibandingkan penjualan Oktober sebanyak 72.226 unit. Sementara itu, penjualan ritel naik tipis 3,5% secara *month-to-month* (MtM) menjadi 76.053 unit pada November 2024, dibandingkan Oktober 2024 sebesar 73.475 unit.

Ditinjau berdasarkan mereknya, penjualan mobil secara *wholesales* tertinggi masih diraih oleh Grup Astra, yakni Toyota dan Daihatsu masing-masing sebesar 26.984 unit dan 10.030 unit pada November 2024. (*)

Pembiayaan Alat Berat Terangkat Kebijakan Penghiliran

JAKARTA — Pembiayaan alat berat terus menunjukkan tren positif dengan sektor komoditas dan konstruksi sebagai penopang utama. Pelaku industri pembiayaan optimistis mampu terus memacu pembiayaan alat berat hingga 2025 dengan didukung kebijakan pemerintah yang menunjang sektor konstruksi serta stabilitas harga komoditas.

Stanly Darisang, Corporate Business Head PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance, dia menuturkan BFIN optimistis bahwa pembiayaan alat berat akan terus mengalami pertumbuhan seiring ekspektasi peremajaan unit serta peningkatan produksi segmen komoditas serta harga komoditas yang relatif stabil.

“Kami optimistis permintaan pembiayaan alat berat hingga akhir 2024 dan 2025 akan terus bertumbuh, di mana para pengusaha diperkirakan akan kembali melakukan investasi untuk peremajaan unit serta peningkatan produksi,” kata Stanly.

Stanly menyebut selain tren harga komoditas, momentum pemerintahan yang baru pada 2025

diharapkan dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan perekonomian, termasuk di sektor alat berat.

“Database customer yang kami miliki cukup baik dan pangsa pasarnya juga masih besar,” kata Stanly.

Selain itu, pembiayaan alat berat BFI Finance cukup terdiversifikasi di berbagai sektor ekonomi, dengan porsi terbesar di sektor konstruksi dan pertambangan.

Dengan kondisi tersebut, Stanly percaya BFI Finance mampu menjaga pertumbuhan bisnis di pembiayaan alat berat ini, karena tidak tergantung hanya pada satu sektor tertentu dan berfokus pada kelolaan risiko yang *prudent*.

Hingga September 2024, piutang dikelola (*managed receivables*) khusus untuk pembiayaan alat berat BFI Finance mencapai sebesar Rp2,9 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 9% secara tahunan (*year-on-year/YoY*). Adapun segmen pembiayaan alat berat berkontribusi sebesar 12,7% bagi keseluruhan portofolio pembiayaan perseroan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait statistik lembaga pembiayaan per September 2024, piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,39% YoY menjadi Rp501,78 triliun. Pada periode yang sama, laba industri naik 0,84% YoY menjadi Rp16,97 triliun.

Secara total, penyaluran kredit untuk sektor otomotif masih mendominasi hingga 77,33% dari total piutang industri pembiayaan.

Untuk alat berat, data OJK menunjukkan penyaluran pembiayaan per September 2024 mencapai Rp44,10 triliun. Realisasi itu bertumbuh 8,90% YoY dan berkontribusi sebesar 8,34% bagi total pembiayaan industri.

Di sisi lain, berdasarkan data Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) produksi alat berat saat ini tercatat mencapai 5.138 unit pada Januari–September 2024. Angka produksi tersebut turun 17,77% dari periode yang sama tahun lalu yakni 6.248 unit.

Meskipun demikian, Hinabi optimistis target produksi alat berat konstruksi dan pertambangan sebanyak 8.000 unit tahun ini akan tercapai. Setali tiga uang. Perusahaan pembiayaan pun masih optimistis untuk memacu pembiayaan alat berat pada akhir 2024.

Salah satunya adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance. Chief Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani mengungkapkan pembiayaan pada segmen itu telah mencapai Rp407 miliar, meningkat dua kali

lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pembiayaan alat berat perusahaan tercatat sebesar Rp407 miliar hingga Oktober 2024 atau meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Gani.

Gani mengungkapkan, Adira Finance menyalurkan pembiayaan alat berat ke sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta angkutan truk. Pembiayaan alat berat berkontribusi sekitar 1,33% terhadap total pembiayaan Adira Finance yang per Oktober 2024 mencapai Rp30,7 triliun.

Menurutnya, pembiayaan alat berat sangat dipengaruhi oleh sektor komoditas. Oleh karena itu, fluktuasi harga komoditas dan transisi energi menjadi tantangan untuk sektor alat berat.

Meski demikian, peluang pertumbuhan masih terbuka, terutama didukung oleh sektor konstruksi yang tetap tumbuh. Hal ini didorong oleh belanja modal pemerintah serta penanaman modal asing yang terus mengalir.

Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah juga diprediksi akan meningkatkan permintaan alat berat, terutama untuk mendukung proyek ketahanan pangan dan pengelolaan komoditas di Indonesia.

“Program swasembada pangan diperkirakan akan meningkatkan permintaan alat berat, terutama untuk mendukung proyek ketahanan pangan dan pengelolaan komoditas Indonesia,” kata Gani. (*)

Napas Tambahan Bisnis Mobil *Hybrid*

JAKARTA — Kalangan agen pemegang merek atau APM merespons positif langkah pemerintah yang menerbitkan insentif dalam bentuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Ditanggung pemerintah sebesar 3% untuk kendaraan bermotor jenis *hybrid*.

Kebijakan tersebut menjadi jalan tengah atas upaya yang dilakukan oleh produsen kendaraan bermotor yang selama ini mengkombinasikan sistem penggerak mesin dengan bahan bakar minyak (BBM) dan baterai listrik.

Menurut Chief Executive Officer Andalan Motors Raynaldi Setiawan, Andalan Motors selaku agen pemegang merek Morris Garage (MG) di Indonesia bakal terus menambah diler baru di Tanah Air.

Dia menjelaskan Andalan Motors membuka diler MG Motor baru di kawasan SCBD Jalan Jenderal Sudirman Lot 8 Kav. 52—53, SCBD Senayan, Jakarta Selatan.

Menurutnya, SCBD dipilih sebagai lokasi diler ini karena strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen.

“Andalan Motors membangun diler MG di SCBD, daerah elit di Jakarta, sebagai bentuk komitmen untuk memperkenalkan merek ini ke lebih banyak konsumen,” jelasnya dalam seremoni pembukaan diler MG SCBD Jakarta.

Dia menambahkan pembukaan diler baru bertujuan mempermudah tim penjualan menjangkau lebih banyak pelanggan di area Jakarta Pusat dan sekitarnya.

Adapun, Raynaldi menilai prospek kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) terutama di Jakarta sangat menjanjikan. Alasannya, EV akan membantu mobilitas pelanggan, didukung oleh peraturan pemerintah, seperti ganjil genap.

“Dalam konteks ini, MG menjadi pilihan kendaraan listrik yang terjangkau dengan spesifikasi yang sudah sangat baik,” katanya.

Hingga kini, dia mengatakan penjualan EV Morris Garage sekitar 2.000-an unit. Adapun, Andalan Motors adalah diler MG yang paling banyak menjual EV.

Adapun, Morris Garage memiliki serangkaian model mobil listriknya, seperti MG 4 EV, New MG ZS EV, dan MG Cyberster.

Dia optimistis prospek penjualan MG di Indonesia. Alasannya, MG akan mengeluarkan jajaran produk yang berfokus kepada pasar Indonesia, baik mobil mesin pembakaran internal, mobil listrik baterai, hingga *hybrid*.

MG Motor SCBD adalah dealer 1S (*sales*) dengan fokus ke kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*). MG SCBD mempunyai desain yang berbeda dari MG *showroom* pada umumnya, dengan mengusung *concept Clean, Modern* dan *Minimalist*. Hal ini sejalan dengan karakter SCBD *Park* yang merupakan kawasan hijau ramah EV. Di kawasan ini, terdapat parkir khusus EV dan sejumlah fasilitas *charging station*.

“Tersedia juga unit *test drive* bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman berkendara dengan produk MG Motor dan fasilitas *charging station*,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, produsen otomotif asal China, Great Wall Motor (GWM) Indonesia, juga menyiapkan strategi jitu untuk mendorong penjualan mobil *hybrid*, terutama setelah pemerintah memberikan diskon pajak atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil *hybrid* sebesar 3%.

Sales & Network Director GWM Indonesia Lisa Wijaya mengatakan strategi itu diwujudkan sebagai respons setelah pemerintah memperhatikan kategori *hybrid* yang merupakan tulang punggung segmen kendaraan listrik saat ini.

“Kami yakin insentif ini akan berdampak baik dalam menjaga harga yang ditawarkan kepada konsumen tetap kompetitif,” ujar Lisa.

Lebih lanjut, dia mengatakan GWM berkomitmen menghadirkan sejumlah model dengan teknologi kecerdasan baru, energi baru, dan pengalaman baru.

“Yang paling dekat pada 2025, kami akan menghadirkan serangkaian produk baru yang menjawab permintaan dan kebutuhan konsumen Indonesia,” lanjutnya.

Sebagai informasi, GWM Indonesia memiliki berbagai lini model *hybrid electric vehicle* (HEV), di antaranya yakni GWM Tank 300 HEV, GWM Tank 500 HEV, Haval H6 HEV, dan Haval Jolion HEV.

Adapun, porsi model *hybrid* yang dominan menjadi strategi GWM dalam menghadapi persaingan dengan merek asal China lainnya lebih fokus untuk mengembangkan mobil listrik murni (*battery electric vehicle*/BEV) atau justru mobil konvensional (*internal combustion engine*/ICE).

Saat ini, GWM telah memiliki fasilitas produksi di Wanaherang, Jawa Barat. Lini produksi dan operasi logistik GWM di Inchcape Manufacturing Facility memiliki luas 20.277 m² dari total luas fasilitas 411.392 m². Lini produksi GWM itu memiliki kapasitas produksi sekitar 7.000 unit per tahun.

Tak hanya kendaraan hibrida, GWM juga memiliki model BEV yakni Ora 03 BEV yang rencananya diproduksi lokal. Sejauh ini, GWM telah memproduksi lokal model Haval Jolion HEV.

Namun, saat ini nilai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN GWM Haval Jolion sedang dilakukan verifikasi oleh tim auditor, sehingga belum dapat dinyatakan nilainya.

“Terkait produksi lini lain, tentu akan ada lini produk baru yang akan kami produksi di Inchcape Manufacturing Facility di Wanaherang. Mohon menunggu pengumuman resmi terkait ini,” katanya.

Tidak hanya insentif untuk *hybrid*, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif PPN DTP 10% untuk impor mobil listrik *completely knocked down* (CKD). Lalu, PPnBM DTP untuk impor mobil listrik secara utuh atau *completely built up* (CBU) dan CKD sebesar 15%, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.

STRATEGI SUZUKI

Sementara itu, produsen otomotif asal Jepang PT Suzuki Indomobil Sales merespons positif setelah pemerintah mengumumkan insentif PPnBM DTP untuk mobil *hybrid* sebesar 3%.

4W Marketing Director Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel mengatakan, perseroan turut mengamati informasi PPnBM DTP untuk mobil

hybrid. Namun, dia belum dapat membeberkan lebih lanjut terkait strategi Suzuki ke depan, terutama di segmen elektrifikasi.

“Saat ini, kami semua masih menunggu detail regulasi dan mekanisme yang akan diterbitkan terhadap konteks pemberian insentif kepada kendaraan *hybrid* tersebut,” ujar Harold.

Terlepas dari itu, dia mengatakan Suzuki masih konsisten menghadirkan model-model *hybrid electric vehicle* (HEV) sebagai solusi kendaraan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Terlebih, Suzuki telah memiliki sejumlah model mobil *hybrid* yang telah diproduksi lokal di Indonesia, tepatnya di Pabrik Suzuki Cikarang, Jawa Barat. Misalnya Suzuki XL7 Hybrid dan Ertiga Hybrid, yang nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)-nya tembus di atas 80%.

“Upaya tersebut didukung wujud TKDN di atas 80% pada New XL7 Hybrid dan All New Ertiga Hybrid,” kata Harold.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan kebijakan baru yang diterbitkan yaitu insentif untuk mobil *hybrid* yang bentuknya berupa PPnBM DTP sebesar 3%.

Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan mobil *hybrid* di Indonesia. Selain itu, kebijakan itu juga sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

“Yang terbaru adalah PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor *hybrid*. Untuk PPnBM *hybrid* itu pemerintah memberikan diskon atau ditanggung pemerintah sebesar 3%,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan.

Tak hanya insentif untuk *hybrid*, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif PPN DTP 10% untuk impor mobil listrik CKD. Lalu, PPnBM DTP untuk impor mobil listrik secara utuh CBU dan CKD sebesar 15%, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.

“Sesuai program yang sudah berjalan ini juga ada pembebasan masuk CBU masih diberikan,” kata Airlangga. (*)

Paket Ekonomi Pemantik Daya Beli

JAKARTA — Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat serta menstimulus perekonomian di tengah kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Isi paket kebijakan itu menysasar rumah tangga, pekerja industri padat karya, UMKM, dan sektor yang memberikan efek berganda seperti perumahan dan otomotif.

Paket kebijakan itu a.l. PPN ditanggung pemerintah 1% untuk tepung terigu dan gula industri serta minyak goreng atau Minyak Kita yang sering dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian, industri di sepanjang rantai produksi bahan-bahan pangan itu hanya akan menanggung PPN 11%.

Ada pula diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA selama Januari-Februari 2025.

Pemerintah juga menanggung PPh pasal 21 karyawan sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan. Pekerja yang mengalami PHK pun mendapatkan jaminan

kehilangan pekerjaan berupa manfaat tunai 60% *flat* dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi, serta akses akses program Prakerja.

Untuk sektor perumahan, pemerintah kembali menanggung PPN (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar.

Di sektor otomotif, kendaraan listrik berbasis baterai akan menikmati a.l. PPN DTP 10% atas kendaraan listrik roda empat tertentu dan bus listrik tertentu dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah menyusun paket kebijakan dengan mempertimbangkan pelemahan permintaan, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Berbagai stimulus itu diharapkan mendukung sektor produktif seperti industri manufaktur dan perumahan.

“Ini asas keadilan. Tidak mungkin sempurna, tapi kami coba mendekati, menyempurnakan,

dan memperbaiki,” ujarnya dalam konferensi pers peluncuran paket kebijakan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan alasan pemerintah tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12% sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurutnya, kenaikan PPN masih sangat diperlukan.

“Penerimaan perpajakan sangat diperlukan untuk membiayai berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Pemerintah meyakini kenaikan PPN mampu diserap oleh daya beli masyarakat yang masih terjaga. Airlangga menyebut konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni 53,1% pada kuartal III/2024.

Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada November 2024 sebesar 125,9 atau di *level* optimistis. Selain itu, NielsenIQ Retail Spending Barometer pada kuartal III/2024 menunjukkan belanja masyarakat masih tumbuh 1,7% *year on year* dengan total belanja konsumen Rp250 triliun.

Hanya saja, sebagai kompensasi, pemerintah mengeluarkan belasan kebijakan insentif fiskal agar kenaikan PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

Airlangga menambahkan, paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor padat karya, menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, serta pada gilirannya kesejahteraan masyarakat.

KOORDINASI KEBIJAKAN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang efektivitas paket kebijakan ini dalam pemulihan daya beli sangat bergantung pada koordinasi kebijakan lain yang mendukung stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi dan penguatan lapangan kerja.

Menurut Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak.

“Pelaku usaha menyerukan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara efektif,” kata Shinta.

Dari kalangan pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT), Asosiasi Produsen Benang, Serat dan Filamen (APSyFI) menilai insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak akan berpengaruh besar untuk industri padat karya, termasuk TPT.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) memproyeksi implementasi perpanjangan PPN DTP tak signifikan mendorong penjualan perumahan.

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya mengatakan ketidakefektifan itu karena syarat pemberian PPN DTP hanya berlaku bagi rumah *ready stock*.

“Transaksi seperti itu sangat sedikit, paling hanya 5% [dari total penjualan secara umum],” katanya.

Bambang melihat implementasi PPN DTP itu umumnya hanya dapat dirasakan oleh pengembang besar.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat berbagai paket stimulus yang pemerintah tawarkan sudah cukup baik, tetapi bukan untuk meningkatkan daya beli.

Riefky memandang masyarakat lebih membutuhkan kebijakan peningkatan upah untuk meningkatkan daya beli. (*)

FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara menggelar "Diskusi Terarah Pengurus Inti Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sumatera Utara pada Selasa 17 Desember 2024. Acara ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara Yusri.

Diskusi terarah ini menghadirkan delapan narasumber diantaranya, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi, Regional Chief

Executive Officer (CEO) BRI Regional Office Medan Dani Alfianto yang juga selaku Ketua Umum Forkom IJK Sumut, Regional CEO BSI Syahril Alrasyid, Pimpinan Divisi Kredit Bank Sumut Ramadhan Muda Siregar, Kepala Pengembangan Bisnis BCA Efan Budiana mewakili Perbanas Sumut, mewakili APPI Marcel Soekandar, Hastama S Purba mewakili Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) dan Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumut Muhammad Pintor Nasution.

19 Desember 2024, FKD Solo melakukan silaturahmi dan audiensi ke kantor OJK Solo terkait dengan kondisi yang ada di wilayah Solo Raya.

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JANUARI

Due Date: 10 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Layanan Pengaduan Konsumen secara semesteran (Juli - Des)

Metode Pelaporan

Online : SIPEDULI

Acuan Peraturan

Pasal 79 POJK 22 tahun 2023
tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Due Date: 10 Januari

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Januari

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbus2/loginpage.jsp>

Due Date: 15 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Pelaporan SIPESAT PPAATK (periode Oktober - Desember)

Metode Pelaporan

Online: SIPESAT
Mengacu kepada sistem PPAATK.

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JANUARI

Metode pelaporan SIPEDULI tidak sesuai mengingat SIPEDULI merupakan sistem yang berkaitan dengan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen

Acuan Peraturan

SE No. 8 tahun 2016

Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Penggunaan Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Penggunaan Terpadu

Due Date: 15 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Perubahan Rencana Utang luar Negeri (ULN)

Metode Pelaporan

SIUL (sistem utang luar negeri) BI

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Realisasi Literasi terdiri dari :

- Sasaran
- Program Literasi Keuangan
- Tujuan
- Bentuk Aktivitas
- Frekuensi
- Kota

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui <http://peduli.ojk.go.id/>
Laporan secara offline (hard copy) ke OJK

Tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis. Tata cara penyampaian mengikuti penyampaian rencana bisnis tahunan, SEOJK 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (2) POJK 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 14 ayat (1) tentang POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Pemenuhan Syarat Keberlanjutan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS terdiri dari :

- Surat pengantar (hard copy) ditandatangani Direksi
- Isi laporan berupa bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah memenuhi syarat keberlanjutan

Metode Pelaporan

Laporan dalam bentuk softcopy ke OJK melalui email kepada: mailingroomwismul@ojk.go.id

Acuan Peraturan

Pasal 66 POJK No. 35/POJK.05/2018

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 63 POJK No. 10 /POJK.05/2019

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Realisasi Rencana Bisnis

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas format laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah terdapat format file excel untuk membantu penyusunan yang dapat diunduh melalui web silaras.ojk.go.id (web untuk penyampaian laporan bulanan PP)

Acuan Peraturan

Pasal 14 ayat (4) POJK 24/POJK.05/2019

Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas

format laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JANUARI

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (4) POJK 24/POJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Tenaga Kerja oleh Tenaga Kerja Asing

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Acuan Peraturan

POJK No. 24/POJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan SEOJK No. 23/SEOJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Tenaga Kerja 2.5%

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Acuan Peraturan

POJK No. 24/POJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan SEOJK No. 23/SEOJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Realisasi rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (4) POJK 24/POJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Metode Pelaporan

Laporan melalui melalui APOLO ke OJK

Acuan Peraturan

Pasal 74 ayat (1) huruf e POJK 8 tahun 2023

Due Date: 31 Januari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan penerapan Strategi Anti Fraud

Metode Pelaporan

Secara Online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

Pasal 19 POJK No. 12 tahun 2024 Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FEBRUARI

Due Date: 10 Februari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Februari

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Februari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Februari

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbu2/loginpage.jsp>

Due Date: 15 Februari

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan
- Laporan rencana tindak dari hasil penilaian sendiri (bukan dari hasil penilaian OJK)

Metode Pelaporan

Online : melalui APOLO

Acuan Peraturan

Pasal 4 ayat (6) huruf a POJK 28/POJK.05/2020

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

MARET

Due Date: 10 Maret

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Maret

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Maret

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Maret

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Due Date: 30 Maret

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Triwulan

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

APRIL

Due Date: 10 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 April

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 April

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbu2/loginpage.jsp>

Due Date: 15 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Pungutan OJK Tahap I (Januari - Maret)

Metode Pelaporan

Pastikan jumlah yang dibayar telah sesuai dengan total tagihan dalam sistem SIPO yang jatuh tempo tanggal 15 April

Acuan Peraturan

Pasal 9 ayat (1) POJK 3/POJK.02/2014 sebagaimana telah diubah menjadi POJK 22/POJK.02/2020

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

APRIL

Due Date: 15 April

Nama Pelaporan (institusi: PPAATK)

Pelaporan SIPESAT PPAATK (periode Jan - Maret)

Metode Pelaporan

Online : melalui SIPESAT
Mengacu kepada sistem PPAATK.
Metode pelaporan SIPEDULI tidak sesuai mengingat SIPEDULI merupakan sistem yang berkaitan dengan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen

Acuan Peraturan

SE No. 8 tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Penggunaan Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Penggunaan Terpadu

Due Date: 30 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit (Audited Report)

Metode Pelaporan

Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD/FDI), disampaikan kepada: Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Acuan Peraturan

Pasal 103 POJK No. 35/POJK.05/2018
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Due Date: 30 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit (Audited Report) ke koran

Metode Pelaporan

Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD/FDI), disampaikan kepada: Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Acuan Peraturan

Pasal 106 POJK No. 35/POJK.05/2018
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Due Date: 30 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (termasuk didalamnya laporan penerapan strategi anti fraud)

Metode Pelaporan

Laporan dalam bentuk softcopy ke OJK melalui email kepada mailingroomwismul@ojk.go.id

Acuan Peraturan

Pasal 58 ayat (4) POJK 30/POJK.05/2014 sebagaimana telah diubah POJK 29/POJK.05/2020

POJK 35/POJK.05/2018

Pasal 64 ayat 1

Due Date: 30 April

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Keberkelanjutan (termasuk dipublikasikan di web LJK)

Metode Pelaporan

Laporan dalam bentuk softcopy disampaikan kepada:

1. IDX dan OJK Pasar Modal melalui Aplikasi IDX Net dan SPE OJK
2. OJK Pengawas disampaikan kepada Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura melalui email mailingroomwismul@ojk.go.id (note : softcopy dan bukti publikasi juga di email ke PIC Pengawas OJK)

Laporan Keberlanjutan disusun sesuai format pada Lampiran II POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Acuan Peraturan

Penyampaian Laporan Keberlanjutan: Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Publikasi Laporan Keberlanjutan:

Pasal 12 ayat (2) POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

MEI

Due Date: 10 Mei

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Mei

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Mei

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Mei

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbu2/loginpage.jsp>

Due Date: 20 Mei

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Publikasi Audited Report di Koran ke OJK

Metode Pelaporan

Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD/FDI), disampaikan kepada: Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Acuan Peraturan

POJK No. 35/POJK.05/2018

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JUNI

Due Date: 10 Juni

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Juni

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Juni

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Juni

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Due Date: 30 Juni

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Kinerja KAP/AP dalam memberikan jasa audit laporan keuangan tahunan
- Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP

Metode Pelaporan

Laporan disampaikan secara online melalui aplikasi OJK (APOLO)

Acuan Peraturan

POJK No. 9 TAHUN 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JUNI

Due Date: 30 Juni

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan (dilakukan 1 kali per tahun)

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (SILARAS/<http://silarasdev.ojk.go.id/>) dan disampaikan melalui email

Laporan perubahan rencana bisnis tahunan disampaikan **paling lambat 30 hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis** disertai dengan alasan perubahan secara tertulis. Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

Sehingga penyampaian **laporan perubahan rencana bisnis tahunan disampaikan paling lambat 30 hari kerja sebelum 30 Juni**

Acuan Peraturan

Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) POJK 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 30 Juni

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan pengkinan atas dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual

Metode Pelaporan

email ke OJK Pengawasan dan mailto: mailingroomwismul@ojk.go.id

Acuan Peraturan

Pasal 74 ayat 1 huruf b POJK 8 tahun 2023

Due Date: 30 Juni

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Tahunan

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbumv2/loginpage.jsp>

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JULI

Due Date: 10 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Layanan Pengaduan Konsumen secara semesteran (Jan - Jun)

Metode Pelaporan

Online : SIPEDULI

Acuan Peraturan

Pasal 79 POJK 22 tahun 2023
Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Due Date: 10 Juli

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Pungutan OJK Tahap II (April - Juni)

Metode Pelaporan

Pastikan jumlah yang dibayar telah sesuai dengan total tagihan dalam sistem SIPO yang jatuh tempo tanggal 15 Juli (perhatikan apakah ada tagihan adjustment yang disebabkan adanya penyesuaian dasar pengenaan berdasarkan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit)

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JULI

Acuan Peraturan

Pasal 9 ayat (1) POJK 3/POJK.02/2014
Sebagaimana telah diubah menjadi POJK 22/POJK.02/2020

Due Date: 15 Juli

Nama Pelaporan (institusi: PPAATK)

Pelaporan SIPESAT PPAATK (periode April - Juni)

Metode Pelaporan

Online : melalui SIPESAT
Mengacu kepada sistem PPAATK.
Metode pelaporan SIPEDULI tidak sesuai mengingat SIPEDULI merupakan sistem yang berkaitan dengan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen

Acuan Peraturan

Mengacu kepada sistem PPAATK.
Metode pelaporan SIPEDULI tidak sesuai mengingat SIPEDULI merupakan sistem yang berkaitan dengan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen

Due Date: 15 Juli

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbbuv2/loginpage.jsp>

Due Date: 15 Juli

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Perubahan Rencana Utang luar Negeri (ULN)

Metode Pelaporan

SIUL (sistem utang luar negeri) BI

Due Date: 31 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Realisasi Literasi terdiri dari :

- Sasaran
- Program Literasi Keuangan
- Tujuan
- Bentuk Aktivitas
- Frekuensi
- Kota

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui <http://peduli.ojk.go.id/>

Tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis. Tata cara penyampaian mengikuti penyampaian rencana bisnis tahunan, SEOJK 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (2) POJK 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 14 ayat (1) tentang POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Due Date: 31 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Realisasi Inklusi Terdiri dari:

- Sasaran
- Program Inklusi Keuangan
- Tujuan
- Bentuk Aktivitas
- Frekuensi
- Kota

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui <http://peduli.ojk.go.id/>

Tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis. Tata cara penyampaian mengikuti penyampaian rencana bisnis tahunan, SEOJK 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (2) POJK 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 14 ayat (1) tentang POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

JULI

Due Date: 31 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Realisasi Rencana Bisnis

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas format laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

terdapat format file excel untuk membantu penyusunan yang dapat diunduh melalui web silaras.ojk.go.id (web untuk penyampaian laporan bulanan PP)

Acuan Peraturan

Pasal 14 ayat (4) POJK 24/POJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 31 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas

format laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (4) POJK 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 31 Juli

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Realisasi rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Acuan Peraturan

Pasal 15 ayat (4) POJK 24/POJK.05/2019
Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

AGUSTUS

Due Date: 10 Agustus

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Agustus

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Agustus

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Agustus

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbbv2/loginpage.jsp>

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

SEPTEMBER

Due Date: 10 September

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 September

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 September

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 September

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Due Date: 30 September

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Triwulan

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Due Date: 30 September

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Metode Pelaporan

email: Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas
Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

Acuan Peraturan

Pasal 85 ayat 1 dan (2) POJK 22/2023

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

OKTOBER

Due Date: 10 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Pungutan OJK Tahap III (Juli - September)

Metode Pelaporan

Pastikan jumlah yang dibayar telah sesuai dengan total tagihan dalam sistem SIPO yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober

Acuan Peraturan

Pasal 9 ayat (1) POJK 3/POJK.02/2014 sebagaimana telah diubah menjadi POJK 22/POJK.02/2020

Due Date: 15 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: PPATK)

Pelaporan SIPESAT PPATK (periode Juli - Sept)

Metode Pelaporan

Online: SIPESAT
Mengacu kepada sistem PPATK.
Metode pelaporan SIPEDULI tidak sesuai mengingat SIPEDULI merupakan sistem yang berkaitan dengan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

OKTOBER

Acuan Peraturan

SE No. 8 tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Penggunaan
Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi
Penggunaan Terpadu

Due Date: 15 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbu2/loginpage.jsp>

Due Date: 23 Oktober

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Pedoman Strategi Anti Fraud

Metode Pelaporan

secara daring melalui sistem pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

POJK No. 12 Tahun 2024
Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga
Jasa Keuangan

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

NOVEMBER

Due Date: 10 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 November

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 November

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbusv2/loginpage.jsp>

Due Date: 30 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Rencana Penyelenggaraan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Terdiri dari:

- Penetapan Program Kerja Edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan Perusahaan Pembiayaan
- Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Edukasi periode sebelumnya
- Penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Edukasi

Laporan Rencana Pelaksanaan Inklusi Keuangan

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui
<http://peduli.ojk.go.id/>
Tercantum dalam rencana bisnis.

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

NOVEMBER

Tata cara penyampaian mengikuti penyampaian rencana bisnis tahunan, SEOJK 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) POJK 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

Due Date: 30 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Rencana Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Tata Cara Penyampaian sesuai POJK:

1. Disusun sesuai format pada Lampiran I POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
2. Disampaikan sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah
3. Dalam hal Perusahaan menyampaikan sebagai bagian dari rencana bisnis, disampaikan melalui SILARAS
4. Dalam hal Perusahaan menyampaikan terpisah dari rencana bisnis, dapat disampaikan melalui hardcopy disertai email kepada masing-masing PIC pengawas

Acuan Peraturan

Pasal 4 ayat (2) huruf a POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Due Date: 30 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas format laporan sebagaimana diatur dalam SEOJK 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan

Syariah (terdapat format file excel untuk membantu penyusunan yang dapat diunduh melalui web silaras.ojk.go.id (web untuk penyampaian laporan bulanan PP)

Acuan Peraturan

Pasal 8 ayat (2) POJK 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 30 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung rencana kegiatan usaha.

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Acuan Peraturan

Pasal 8 ayat (2) POJK 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Due Date: 30 November

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui sistem online OJK (APOLO) dan disampaikan melalui email PIC pengawas bersamaan dengan Laporan Rencana Bisnis Tahunan

Acuan Peraturan

Pasal 8 ayat (2) POJK 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DESEMBER

Due Date: 10 Desember

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan ("LBPP") terdiri dari :

- Neraca Bulanan
- Laporan Laba Rugi
- Rekening Administratif
- Laporan Arus Kas
- Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Pembiayaan
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Profil Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Profil Perusahaan Pembiayaan
- Rincian Izin Usaha
- Rincian Kantor Cabang
- Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
- Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
- Rincian Kepengurusan
- Rincian Pihak Terkait
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi

Laporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan terdiri dari :

- Laporan Posisi Keuangan
- Rekening Administratif
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- Laporan Arus Kas
- Rincian Pembiayaan yang Diberikan
- Rincian Surat Berharga yang Dimiliki
- Rincian Penyertaan Modal
- Rincian Rupa-Rupa Aset
- Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
- Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan
- Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- Laporan Analisis Kesesuaian Aset & Liabilitas

Metode Pelaporan

Laporan secara online melalui Silaras
OJK: <https://silaras.ojk.go.id/User/Login>

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 3/POJK.05/2013
Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Due Date: 10 Desember

Nama Pelaporan (institusi: IDX)

Laporan Valuta Asing (Valas)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.idxnet.co.id/idxnet/login>

Due Date: 12 Desember

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

- Laporan Debitur (SLIK)
- Koreksi Laporan Debitur (SLIK) atas temuan Pelapor

Metode Pelaporan

Online : melalui SLIK Reporting

Acuan Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18 /POJK.03/2017
Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Due Date: 15 Desember

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD)

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Due Date: 30 Desember

Nama Pelaporan (institusi: BI)

Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
(KPPK) Triwulan

Metode Pelaporan

Laporan secara Online :
<https://www.bi.go.id/lkpbuy2/loginpage.jsp>

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DESEMBER

Due Date: 31 Desember

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Terdiri dari:

- Surat pengantar (hard copy) ditandatangani Direksi yang bertanggung jawab atas penerapan APU & PPT
- Isi laporan (hardcopy dan softcopy di dalam CD)

Metode Pelaporan

Laporan secara online ke OJK melalui APOLO

Acuan Peraturan

Pasal 74 ayat (1) huruf e POJK 8 tahun 2023

Due Date: 31 Desember

Nama Pelaporan (institusi: OJK)

Pungutan OJK Tahap IV (Oktober - Desember)

Metode Pelaporan

Pastikan jumlah yang dibayar telah sesuai dengan total tagihan dalam sistem SIPO yang jatuh tempo tanggal 31 Desember

Acuan Peraturan

Pasal 9 ayat (1) POJK 3/POJK.02/2014 sebagaimana telah diubah menjadi POJK 22/POJK.02/2020

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN LAINNYA

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen penunjukan AP dan/atau KAP disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan AP dan/atau KAP.

Due Date

10 HK setelah penunjukan

Metode Pelaporan

Laporan disampaikan secara online melalui aplikasi OJK (APOLO)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan Anti Fraud:

Laporan setiap fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan, Paling sedikit memuat:

- nama LJK;
- pelaku Fraud;
- jabatan pelaku Fraud pada saat melakukan Fraud;
- status tindak lanjut penanganan Fraud;
- jenis Fraud;
- aktivitas terkait Fraud;
- deskripsi Fraud atau modus operandi;
- lokasi kejadian Fraud
- divisi/bagian terjadinya Fraud;
- pihak yang dirugikan;
- waktu kejadian Fraud; dan
- jumlah kerugian.

Due Date

3 (tiga) hari kerja setelah diketahui terjadinya Fraud yang berdampak signifikan

Metode Pelaporan

secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Acuan Peraturan

POJK 35/POJK.05/2018, Pasal 64 ayat 1

Nama Laporan (institusi: OJK)

Rencana penerbitan efek melalui penawaran umum

Due Date

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RUPS yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas

Metode Pelaporan

Laporan dalam bentuk *softcopy* ke OJK melalui email kepada mailingroomwismul@ojk.go.id

Acuan Peraturan

POJK 35/POJK.05/2018, Pasal 73

Nama Laporan (institusi: OJK)

Rencana penerbitan efek tidak melalui penawaran umum

Due Date

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum RUPS yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas

Metode Pelaporan

Laporan secara *offline (hard copy)*, sesuai format 3 Lampiran POJK 35/POJK.05/2018, ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan)

Acuan Peraturan

POJK 35/POJK.05/2018, Pasal 76

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum

Due Date

Secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tanggal laporan:

- 31 Maret,
- 30 Juni,
- 30 September, dan
- 31 Desember

Metode Pelaporan

Laporan secara *offline (hard copy)*, sesuai format 5 Lampiran POJK 35/POJK.05/2018, ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan).

Acuan Peraturan

POJK 35/POJK.05/2018, Pasal 78

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan pelaksanaan pengumuman laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

Due Date

20 (dua puluh) hari kalender sejak pelaksanaan pengumuman

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN LAINNYA

Metode Pelaporan

Laporan secara offline disertai dengan Surat Pengantar dan dilampiri dengan bukti pengumuman, ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan).

Acuan Peraturan

POJK 35/POJK.05/2018, Pasal 106

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan tindak lanjut atas status pengawasan intensif, antara lain:

- menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
- menyampaikan realisasi rencana tindak; dan
- melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Due Date

Huruf a: 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh OJK

Metode Pelaporan

Laporan secara offline ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan) dengan surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

Rencana Tindak paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian

Acuan Peraturan

POJK 9/POJK.05/202, Pasal 8 ayat (1)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan tindak lanjut atas status pengawasan khusus, antara lain:

- menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;
- menyampaikan realisasi rencana tindak;
- menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
- menyampaikan laporan keuangan terkini;
- menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas;
- menyampaikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang terkini;
- menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait LJKNB, termasuk badan hukum pemegang saham LJKNB sampai dengan kepemilikan terakhir;
- menyampaikan laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

- melakukan tindakan lain dan/atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Due Date

Huruf a: 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh OJK

Huruf c sd. i: 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh OJK

Metode Pelaporan

Laporan secara offline ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan) dengan surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

Rencana Tindak paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LJKNB disertai jangka waktu penyelesaian

Acuan Peraturan

POJK 9/POJK.05/202, Pasal 8 ayat (2)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Rencana Tindak,

- Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan normal namun dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan

Due Date

15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan tindakan pengawasan oleh OJK

Metode Pelaporan

Laporan secara offline ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan) dengan surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

Acuan Peraturan

POJK 9/POJK.05/2021, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Rencana perbaikan permodalan/pendanaan,

- Dalam hal LJKNB ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan/pendanaan.
- Rencana perbaikan permodalan/pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan kemampuan LJKNB untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan/atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh OJK.

Selanjutnya >>

KALENDER PELAPORAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN LAINNYA

Due Date

10 (sepuluh) hari kerja sejak LJKNB ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus.

Metode Pelaporan

Laporan secara offline ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan), dengan surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi LJKNB dan/atau PSP.

Acuan Peraturan

POJK 9/POJK.05/202,1Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan realisasi rencana tindak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 9 ayat (4).

Due Date

setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya.

Metode Pelaporan

Laporan secara offline ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan) dengan surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

Acuan Peraturan

POJK 9/POJK.05/202,1Pasal 11 ayat (1)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Realisasi rencana perbaikan permodalan/pendanaan,

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
- paling sedikit memuat permasalahan LJKNB; tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh LJKNB; dan waktu pelaksanaan perbaikan.

Due Date

setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya.

Metode Pelaporan

Laporan secara offline ke OJK (Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan) dengan surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.

Acuan Peraturan

POJK 9/POJK.05/202,1Pasal 11 ayat (1)

Nama Laporan (institusi: OJK)

Laporan Pelaksanaan Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah, Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Terdiri dari:

- Acara, tempat dan tanggal pelatihan
- Materi pelatihan
- Daftar hadir peserta pelatihan

Due Date

15 Januari

Acuan Peraturan

Berdasarkan POJK 23/2019, Perusahaan wajib melaksanakan pelatihan.

Nama Laporan (institusi: PPKATK)

PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPKATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Metode Pelaporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPKATK.

Acuan Peraturan

POJK 8 tahun 2023

Nama Laporan (institusi: BI)

Laporan Lalu Lintas Devisa

Due Date

15 Januari

Metode Pelaporan

Sistem

Disclaimer: Data mengenai kalender pelaporan merupakan kompilasi APPI dari anggota. APPI tidak menjamin tentang akurasi kelengkapan, kesesuaian, tanggal dan jatuh tempo pelaporan. APPI tidak bertanggungjawab apabila ada anggota yang mendapatkan teguran/peringatan dari pengawas dikarenakan ketidaksesuaian pelaporan. Tabel pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

DATA, INSIGHT AND RECOMMENDATIONS

PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) is an Indonesian credit bureau, licensed by OJK and fully committed to enhance the Indonesian credit ecosystem.

As an affiliate of CRIF SPA, a global company with operations in 37 countries specializing in credit bureaus, business information, analytics, and process automation, CLIK brings international standards and technology to tailor credit bureau services to Indonesia.

Bureau Report Product

- Full Report
- Compliance Report
- Slim Report
- Soft Pull Report
- Unified Report

Scoring Product

- Credit Bureau Score
- CLIK SKAI
- CLIK SPECTRUM

CLIKBoard

How CLIK Can Deliver Better

STRONG DATA QUALITY

- Updated daily and available to users promptly
- Automatic process and standardize quality control
- Correct, countable, having a strong validation process for the quality of subject and contract information

PROVEN MATCHING SYSTEM

- 100% Exact match
- Proven system ad adapted to Indonesia
- Having multiple matching scenarios for various possibilities

EXCELLENT SCORING SYSTEM

- Useful for various usage and customer life cycle
- The specific scoring models are tailored for individual and business

PORTFOLIO ALERT

- Provide most fresh data update/alert in the market
- Flexible with Multiple triggers

DISCUSS YOUR
NEEDS

+62-817-0089-012 info@cbklik.com

DAFTAR ANGGOTA APPI

AB SINAR MAS MULTIFINANCE

Menara Tekno Lantai 7
Jl. KH Fachrudin No.19, Kel. Kampung Bali,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tlp: (021) 3925660

ABEAM CONSULTING INDONESIA

Gedung World Trade Center 1 Lt. 17
Jl. Jend Sudirman Kav 29-31
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Tlp: 5268660

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

Millennium Centennial Center Lt 56
Jl. Jend. Sudirman No.Kav.25, RT.4/RW.2,
Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 39733232, 39733322 Fax: 39734949

ADICIPTA INOVASI TEKNOLOGI

Graha Adicipta Jl. Kebon Jeruk Raya No. 80
Jakarta Barat 11530
Tlp: 53673030

ADITAMA FINANCE

Plaza Bank Index, 8th Floor
Jl. M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat
Tlp: 31931006 Fax: 31931016

AEON CREDIT SERVICE INDONESIA

3A Plaza Kuningan South Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta 12940
Tlp: 252 3331 Fax: 5288 0232 / 0231

AKULAKU FINANCE INDONESIA

Sahid Sudirman Centre Lt. 11-C
Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-50818930

ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE

Gading River View Blok H 56 B,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tlp: 45869941

ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE

Jl. Raden Tumenggung Suryo No. 28
Malang, Jawa Timur 65123
Tlp: 0341-491222 Fax: 0341-470079

AMARTHA WARBLER FINANCE

Jl. TB Simatupang, Kav. 18, RT.2/RW.1,
Cilandak Barat, Jakarta Selatan, 12430

ARMADA FINANCE

Jl. Jend. Sudirman No. 165, Magelang 56125
Tlp: (0293) 313777 Fax: (0293) 313888

ARTHA PRIMA FINANCE

Grand Slipi Tower Lantai 32,
Jl. S. Parman Kav. 22-24 Slipi
Jakarta Barat 11480, Tlp: 2902 2071/72
Fax: 2902 2085

ARTHAASIA FINANCE

Gedung Kencana Tower Lantai 5-6
Business Park Kebon Jeruk
Jl. Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11620,
Telp. 021. 58908189 atau 021. 58908190
Fax. 021. 58908146

ASIA MULTIDANA

Gold Coast Office Tower, Eiffel Tower 3DE,
Pantai Indah Kapuk St, RT.6/RW.2, Jakarta 14470
Tlp: 5068 6688

ASIATIC SEJAHTERA FINANCE

Ruko Karawaci Office Park Excelis 51,
Lippo Karawaci, Tangerang 15810
Tlp: 5510200 Fax: 5510898

ASLI RANCANGAN INDONESIA

Senayan Business Center
Jl. Senayan No.39 Rawa Barat,
Jakarta 12180
Tlp:22775752 / 22775752

ASTRA AUTO FINANCE

Jl. TB Simatupang No. 90,
Tanjung Barat, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220, 788 51198

ASTRA MULTI FINANCE

Menara FIF Lt.10,
Jl. TB. Simatupang, Kav. 15 Lebak Bulus,
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Tlp: 769 8899 Fax: 769 8811

ASTRA SEDAYA FINANCE

Jl. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220, 788 51198

ASTRIDO PACIFIC FINANCE

Toyota Building 3rd Floor,
Jl. Balikpapan Raya No. 7, Jakarta 10160,
Tlp: 231 2220, 231 2221
Fax: 231 0053/345 1334

ATOME FINANCE INDONESIA

Treasury Tower Lantai 16 Unit J,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Lot 28,
Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

AYOPOP TEKNOLOGI INDONESIA

Menara Binakarsa Lt. 11, Lot A,
Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. C-18, RT2/RW5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan 12940

BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO

Komp. Ruko Wolter Monginsidi
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Jakarta Selatan
Tlp: 719 6488 Fax: 719 6489

BCA FINANCE

Wisma BCA Pondok Indah Lt.8, Jl. Metro Pondok Indah
Sektor I-S Kav. No. 10, Jakarta Selatan 12310
Tlp: 299 73100 Fax: 29973232/33

BETA INTI MULTIFINANCE

Ruko The Greencourt Blok D08
Jl. Boulevard Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Tlp: 5309331 Fax: 5363549

BFI FINANCE INDONESIA

BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang
Tlp: 296 50300
www.bfi.co.id

BIMA MULTI FINANCE

Jl. Cideng Barat No. 47i, Jakarta Pusat
Tlp: 638 58555 Fax: 638 58001

BINTANG MANDIRI FINANCE

Graha Bintang Cikini,
Jl. Cikini Raya No 55, Menteng. Jakarta Pusat
Tlp: 3983 0391 Fax: 3192 4731/32

BNI MULTIFINANCE

Graha Binakarsa
Lt. 11 Lot E - F & Lt. 12,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18,
Jakarta Selatan 12940

BRI MULTIFINANCE INDONESIA

Menara BRILiaN Lt. 1,21,dan 22
Jl. Gatot Subroto Kav. 64,
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870
Tlp: (021) 5745333

BUANA FINANCE

Tokopedia Tower
Ciputra World 2 Lt 38, Unit A - F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950
Tlp: 50806969 Fax: 50806996

BOT FINANCE INDONESIA

Wisma Bumiputera, 11th & 12th Floors,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Tlp: 570 6762, 522 4522 Fax: 525 561

BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 29396000 Fax: 29396100

DAFTAR ANGGOTA APPI

CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE

Jl. Raya Kelapa Dua Ruko Blitz 2 Blok C No.17-19,
Paramond Serpong, Kel. Kelapa Dua, Tangerang 15810
Tlp: 22229200, 22229449

CAPELLA MULTIDANA

Jl. Sunter Paradise Timur Raya Blok G2 No. 4-5
Jakarta Utara
Tlp: 640 1001 Fax: 640 1003

CATERPILLAR FINANCE INDONESIA

Beltway Office Park Tower C,
Level 3 unit 3-01 & 3-04,
Jl. TB Simatupang No. 41
Jakarta Selatan 12550
Tlp: 021-29392999

CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE

Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1),
South Tower, Lantai 2, Zone 9, Jl Grand Boulevard,
BSD Green Office Park,
Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisaug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15845
Tlp: (021) 29775800

CENTRAL JAVA POWER

Summitmas Tower I Lt. 15,
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190
Tlp: 520 5041 Fax: 520 2474

CHAILEASE FINANCE INDONESIA

Wisma 46, Lantai 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-25096888

CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING

Gedung TMT 1 Lt.6,
Jl. Cilandak KKO Raya No. 1 Jakarta 12560
Tlp: 299 76650
Fax: 299 76651

CIMB NIAGA AUTO FINANCE

Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15
Bintaro Jaya Sektor IX,
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15229
Telp. (021) 2788-1800

CIPTADANA MULTIFINANCE

Plaza ASIA, Office Park 2-3,
Jl. Jend Sudirman Kav 59, Jakarta 12190
Tlp: 255 74800 Fax: 255 74900, 514 01020

CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH

Jl.R.S. Fatmawati No.29. Jakarta Selatan 12430
Telp : 021-7650222, 7662044 Fax : 021-7661337

CLEMONT FINANCE INDONESIA

Wisma Korindo Lantai 7
Jl. MT Haryono Kav 62 Jakarta 12780
Tlp: 797 6363
Fax: 797 6371, 797 6368

CLIPAN FINANCE INDONESIA

Gedung Wisma Slipi Lt. 6,
Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 12, Jakarta Barat 11480
Tlp: 530 8005 Fax: 530 8026/27

COMMERCE FINANCE

Sopo Del Tower Lantai 32,
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, RT.3/RW.3,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Tlp: 80864285

CREDIT SAISON INDONESIA FINANCE

Gedung Cyber 2 Tower 29th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950.

CRIF LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN (CLIK)

Menara Dea Tower 2, Lantai 8, Suite 803,
Jl. Mega Kuningan Barat Blok E4.3 No 1-2,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950
Tlp: 021-80604228

DAINDO INTERNASIONAL FINANCE

Jl. KH Hasyim Ashari No. 35A Lt. 5
Jakarta Pusat 10150
Tlp: 6323308 Fax: 6323307

DANAREKSA FINANCE

Menara Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Lt. 20-21
Jakarta 10110
Tlp: 29555888

DANA KINI FINANCE

Gedung Kawan Lama Jl. Puri Kencana No. 1,
Kembangan, Meruya, Jakarta Barat 11610
Tlp: 5828282

DANA UNICO FINANCE

Gedung Dana Paint Lt.2, Jl. Pemuda Ujung,
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
Tlp: 29847799 Fax: 29834903

DENTSU SOKEN INDONESIA

Gedung Menara Sentraya Lt. 17 Unit B-1
Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tlp: 27881993

DIGITAL TANDATANGAN ASLI

General Tower Gran Rubina Business Park,
Lantai 20, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22
Setia Budi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12940
Tlp: 021- 25981386

SMART WAY FOR BETTER LIFE

DIPO STAR FINANCE

Sentral Senayan II LT.3. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta
Tlp: 579 54100 Fax: 579 74567

EMPEROR FINANCE INDONESIA

Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Tlp: 29660826 Fax: 29660816

EQUITY FINANCE INDONESIA

Wisma Hayam Wuruk Lt. 8,
Jl. Hayam Wuruk No.8 Kel. Kebon Kelapa,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tlp: 80632888

FAZZ CAPITAL FINANCE

Menara Prima Lt. 10
Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6-2
Kuningan Timur, Jakarta Selatan
Tlp: 50914792

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Menara FIF Lt.3-9, Jalan TB Simatupang Kav.15,
Cilandak, Jakarta 12440
Tlp: 769 8899
Fax: 7590 5599

FINSO NUSANTARA FINANCE

Menara Citicon Lt. 9
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 72, Jakarta Barat

FORTUNA MULTI FINANCE

Jalan Sultan Syahrir Abdurahman No. 1A
Gedung Aneka Paviliun Lt.5, Pontianak

FUJI FINANCE INDONESIA

Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
Tlp: 5226509 Fax: 5226517

GLOBALINDO MULTI FINANCE

Gedung Victoria Lantai 3 Unit 305
Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51
Jakarta Selatan
Tlp: 7396949

GRATAMA FINANCE INDONESIA

Plaza ASIA Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Tlp: 5140 2228 Fax: 5140 2224

HASJRAT MULTIFINANCE

Jl. R.P. Soeroso 38, Jakarta 10350
Tlp: 390 5912-14, 390 0719.
Fax: 314 0609, 390 4114

HEXA FINANCE INDONESIA

Gedung Trinity Lantai 15 Nomor 01-03 dan 05
Jl. HR Rasuna Said No. 6, Karet, Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 2526820 Fax: 2526821

HINO FINANCE INDONESIA

Indomobil Tower Lt. 17, Jl. MT. Haryono Kav. 11
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Tlp: 29827960 Fax: 29827961

HOME CREDIT INDONESIA

Plaza Oleos Lantai 8 & 9 Jl. TB. Simatupang
No. 53A. Jakarta 12520, Indonesia
Telp: +62 21 295 39655 Fax: +62 21 227 80155

HONEST FINANCIAL TECHNOLOGIES

Gedung Metropolitan Tower Lt. 3 ABEF,
Jl. RA. Kartini TB. Simatupang Kav. 14,
Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan 12430
Tlp: 27652022 Fax: 27652023

HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA

Kompleks Simprug Gallery,
Jl. Teuku Nyak Arief No.10-R. Jakarta 12220
Tlp: 727 87845 Fax: 727 87846

DAFTAR ANGGOTA APPI

IFS CAPITAL INDONESIA

Atria @Sudirman lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 33A, Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021 – 57932649

INDOCYBER GLOBAL TEKNOLOGI

Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Tlp: 5663705 Fax: 5663704

INDODANA MULTI FINANCE

Plaza Bank Index Lantai 12
Jl. M.H. Thamrin No. 57 Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat
Telp: (021) 50847707

INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE

Gedung Menara Batavia Lantai 21 Unit A,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat 10220
Tlp: 021-2519 5577

INDOMARCO FINANCIAL SERVICES

Menara Indomaret, Jalan Boulevard Pantai Indah
Kapus, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta 1440
Tlp: 021-50897400

INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

Indomobil Tower Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Tlp: 29185400 Fax: 29185401

INOVASI MITRA SEJATI

The Smith @ Alam Sutera,
5th Fl. Suite 01-17
Tangerang, Banten 15315
Tlp: (021) 3973 – 0397

INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE

Gunung Sahari Raya Komp. Ruko Mangga Dua Square
Blok E. 19-20, Ancol, Pademangan,
Jakarta Utara 14430
Tlp: 6251900 Fax: 6252900

ITC AUTO MULTI FINANCE

Lantai 21 Gama Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kavling C 22, Karet,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Tlp: 22057027 Fax: 22057045

JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE

Lippo Kuningan 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. B-12 Kuningan, Jakarta 12940
Tlp: 2971 0100 Fax: 2911 0313

KARYA TEKNIK MULTIFINANCE

Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta 11230
Tlp: 691 0382 Fax: 691 6267

KARUNIA MULTIFINANCE

Graha Anabatic Lt. 10, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2,
Summarecon Serpong, Tangerang 15811
Tlp: 80636000 Fax: 80636001

KB BUKOPIN FINANCE

Gedung PT. KB Bukopin Finance
Jl. Melawai Raya No. 66, Kramat Pela, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 72789683 Fax: 7278908

KB FINANSIA MULTI FINANCE

SCBD Lot 28 Office 8 Lt. 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
Tlp: 2933 3646 Fax: 2933 3648

KDB TIFA FINANCE

Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-50941140

KOEXIM MANDIRI FINANCE

Equity Tower Lt. 50 Suite 50E SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-51400777

KOMATSU ASTRA FINANCE

Gedung International Financial Centre Lantai 12 B,
Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 22-23,
Kuningan, Karet, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 021-50927450 Fax: 021-50927459

KREDIT BIRO INDONESIA JAYA

Gedung Intiland Tower Lt. 3A,
Jl. Jend Sudirman Kav 32,
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10220

KREDIVO FINANCE INDONESIA

Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260
Telp: 021-22055677

KRESNA REKSA FINANCE

Plaza ABDA Lantai 28,
Jl. Jend Sudirman Kav. 59. Jakarta Pusat 12190
Tlp: 514 01725-27 Fax: 514 01728

LENERA INSPIRASI PEMBIAYAAN

Arkadia Office Park - Tower G Lantai 10
Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520
Tlp: 021-78341735

LIUGONG FINANCE INDONESIA

The Kensington Office Tower Lt. 12,
Boulevard Raya No. 1, Kelapa Gading Timur,
Kelapa Gading, Jakarta Utara

LOTTE CAPITAL INDONESIA

Wisma Keiai 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta
Tlp: 572 4255 Fax: 572 4256

MAHADA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE

Office 8 Building Lt.8
SCBD Lot 28 / Senopati Raya 8B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 021-57903456

MANDALA MULTI FINANCE

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2925 9955 Fax: 2925 9961

MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lantai 3A,
Jl. Iman Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Tlp: 230 5608 Fax: 230 5618

mandiri
utama finance

MANDIRI UTAMA FINANCE

Menara Mandiri I 26-27th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 5278038 Fax: 5278039

Maybank
Finance

MAYBANK INDONESIA FINANCE

Gd. Wisma Eka Jiwa Lt.10,
Jl. Mangga Dua raya, Jakarta Pusat 10730
Tlp: 623 00088 Fax: 623 00099

MEGA FINANCE

Jl. Wijaya I No. 19 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12170
Tlp: 728 00818 Fax: 728 00978

MEGA AUTO FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627/28 Fax: 536 66697/98

MEGA CENTRAL FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627, 536 66628 Fax: 536 66698

MITRA DANA TOP FINANCE

Gedung Top Center
Jl. KH Hasyim Ashari No. 13-13A Jakarta Pusat.
Tlp: 638 66017/18 Fax: 021-6307273

MITSUBISHI HC CAPITAL AND FINANCE INDONESIA

Mid Plaza 2 Building, lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220
Telp. 573 5905 Fax: 573 5906

MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA

Plaza Bank Index Lt. 11.
Jl. MH Thamrin No. 57,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Tlp: 3903238 Fax: 3903245

MIZUHO LEASING INDONESIA

Menara Astra Lantai 32
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220
Tlp: 50851848 Fax: 50851849

MNC FINANCE

MNC Financial Center Building 12th Floor,
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2970 1111 Fax: 3929938

MNC GUNA USAHA INDONESIA (MNC LEASING)

MNC Tower Lt.23. Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 3910993 Fax: 3911093

DAFTAR ANGGOTA APPI

MULTIFINANCE ANAK BANGSA

Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4,
Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel. Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160

MULTINDO AUTO FINANCE

Jl. Pandanaran No. 119A, Semarang 50243
Tlp: (024) 8311130
Fax: (024) 8445254, 8445650

MUTIARA MULTI FINANCE

Aldeoz Building Lt.5,
Jl. Warung Bicuti Raya No.39, Kec.Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Tlp: 27534112 Fax: 27534494

MODALKU FINANSIAL INDONESIA

Unifam Tower, Lt. 10,
Perkantoran Sunrise Garden,
Blok A3 No. 1-7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat

MOLADIN FINANCE INDONESIA

Menara Sentraya Lt. 15 Unit B1
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 021-7255584

NETSOL TECHNOLOGIES

Sentral Senayan 2, Lantai 16 (PACE OFFICE)
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Tlp: 29655859

NUSA SURYA CIPTADANA

The Victoria Lantai 5-7 Jl. Tomang Raya Kav. 35-37,
RT 12 / RW 05, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

NUSANTARA FINANCE CAKRAWALA

Metropolitan Tower Lt. 3,
Jl. R. A. Kartini Kav. 14, Cilandak Barat,
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12430
Telp: 021-50982008

ORICO BALIMOR FINANCE

Graha 137 Lt 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta.
Tlp: 639 3877 Fax: 628 7950

ORIX INDONESIA FINANCE

Wisma Keiai, 24th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta
Tlp: 572 3041 Fax: 572 3074

OTO MULTIARTHA

Gedung Summitas II, Lantai 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta
Tlp: 522 6410
Fax: 522 6424

PACIFIC MULTI FINANCE

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12A
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Tlp: 39506144

PEFINDO BIRO KREDIT

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 5154501

PERMATA FINANCE INDONESIA

Jl. Cideng Timur No. 15, RT 4 RW 4,
Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130

POOL ADVISTA FINANCE

Jl. Soepeno Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau,
Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Tlp: 80626300

PPA FINANCE

Gedung Plaza BP Jamsostek, Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kavling 112 Blok B,
Jakarta 12940
Tlp: 021 - 5798 2255 Fax: 021 - 5798 2266

PRATAMA INTERDANA FINANCE

Cyber 2 Tower Lantai 28,
Jl.H.R Rasuna Sahid Blok X-5 No.13, Kuningan,
Jakarta Selatan

PRIVY IDENTITAS DIGITAL

Jl. Kemang Raya No. 15 C Lantai 4,
Kel. Bangka, Kec Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12730

PROLINE FINANCE INDONESIA

Plaza Asia Lt. 8A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 51401260 Fax: 51401267

RABANA INVESTINDO

Jl. Tomang Raya No. 48A, Jakarta 11430
Tlp: 566 9808-10 Fax: 567 1646, 566 9820

RADANA BHASKARA FINANCE

CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16,
Jl TB Simatupang No. 2 RT001/RW005,
Jakarta 12560
Tlp: 50503333

REKSA FINANCE

Ruko Patal Senayan
Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan
Blok B No. 3 & 5, Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 57940662

RESONA INDONESIA FINANCE

Sampoerna Strategic Square
South Tower Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan - 12930
Telp: (021) 570 1956 Fax: (021) 570 1961

SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA

AXA Tower Lt.32 Suite 03, Kuningan City
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 30480655 Fax: 30480755

SATYADHIKA BAKTI FINANCE

Office Tower The Samator Lt. 9 Unit 8-10
Jl. Raya Kedung Baru No. 26-28
Surabaya 60298
Tlp: 031-99004251

SEMBRANI FINANCE INDONESIA

Carro Square, Lt. 1, Pondok Indah,
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 41, RW. 4,
Kby. Lama Utara, Kby Lama,
Jakarta Selatan 12240
Tlp: 021-50688008

SGMW MULTIFINANCE INDONESIA

Gedung FX Sudirman Lt. 7 No. 5, Jl. Jend Sudirman
Pintu Satu Senayan, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270
Tlp: 22535050

SHAKTI TOP FINANCE

Gedung Top Center Jl. KH Hasyim Ashari
No. 13-13A, Jakarta Pusat
Tlp: 63866017 Fax: 6306880

SHARIA MULTIFINANCE ASTRA

Gedung Menara FIF Lt.3 Suite 303
Jl. TB Simatupang, Lebak Bulus. Jakarta Selatan
Tlp:7698899 Fax:75905599

SHINHAN INDO FINANCE

Wisma Indomobil I Lt. 10,
Jl. MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta 13330
Tlp: 857 9095 Fax: 857 4171

SINARMAS HANA FINANCE

Gedung Roxy Square Lt. 3
Blok B 01 No. 2, Jakarta Barat 11440
Tlp: 56954670 Fax: 56954678

SINAR MITRA SEPADAN FINANCE

Gedung Agro Plaza Lt. 17
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 No.1
Kuningan Timur, Setiabudi.
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864900 Fax: 80864950

SINARMAS MULTIFINANCE

Jl.Lombok No 71
Menteng Gondangdia
Jakarta pusat

SMART MULTI FINANCE

Jl. BSD Boulevard Utara,
Foresta Business Loft 6 No. 20-21, BSD,
Kab.Tangerang, Prov. Banten, 15331
Tlp: (021) 3972 1010, 3972 5050

SMFL LEASING INDONESIA

Menara BTPN Lt.31,
Jl. Dr. Ide. Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6
Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80628710 Fax: 80628719

DAFTAR ANGGOTA APPI

SUMMIT OTO FINANCE

Summitmas II, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 252 2788, 522 6601
Fax: 252 6388

SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE

Jl. Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit A dan E.
Jalan Jend. Sudirman No.86
Jakarta Pusat 10220

SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE

18 Office Park Lantai 23,
Jl. TB Simatupang No. 18. Jakarta 12520
Tlp: 781 7555 Fax: 781 9111, 788 47224

SUZUKI FINANCE INDONESIA

Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung
Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung
Jakarta Timur 13920
Telp: (021) 8060 7000

SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE

Jl. TB Simatupang No. 90
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000
Fax: 788 51220

TAKARI KOKOH SEJAHTERA

Jl. Arjuna Utara No. 131, Tanjung Duren Selatan,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tlp: 564 0101 Fax: 560 3550

TEMPO UTAMA FINANCE

Tempo Scan Tower Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan
Tlp: 29667879

TEZ CAPITAL AND FINANCE

Equity Tower Lt. 29,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 50666206

TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE

(TRUE FINANCE)
Trihamas Building
Jl. TB Simatupang Kav. 11,
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 2933 0533 Fax: 2933 0543

TOPAS MULTI FINANCE

Mayapada Tower 1, Lantai 8,
Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 28, Kelurahan Karet,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Tlp: (021) 2524433

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

The Tower Lt. 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 12. Jakarta Selatan 12930
Tlp: 50821500 Fax: 50821501

TRANSPACIFIC FINANCE

Perkantoran Grogol Permai Blok G24
Jl. Prof. Dr. Latumenten Grogol, Jakarta 12980
Tlp: 5010 2222 Fax: 567 9406

TRIHAMAS FINANCE SYARIAH

Trihamas Building Lt. Dasar
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.11
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 29330530 Fax: 29330529

TRUST FINANCE INDONESIA

Gedung Artha Graha Lt. 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Tlp: 515 5477 Fax: 515 5484

TRUSTING SOCIAL INDONESIA

Treasury Tower Lt. 51, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA

SOHO WESTPOINT Lt. 2,
Jl. Macan Kav. 4-5
Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11510
Tlp: 021-21192288

VARIA INTRA FINANCE

Asean Tower Jl. K.H. Samanhudi No. 10
Jakarta Pusat
No Tlp: 021-3841388 No Fax: 021-3841015

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA

Altira Office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya,
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350
Tlp: 21882400 Fax: 21882420

WOORI FINANCE INDONESIA

Chase Plaza Lt. 16,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 5200434 Fax: 5209160

Bagi anggota APPI yang ingin mencantumkan logo perusahaan harap menghubungi sekretariat APPI di No. Telp: (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

Upcoming Event

Workshop

"Analisa Transaksi Keuangan yang Mencurigakan bagi Perusahaan Pembiayaan"

23 Januari 2025, Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta

SEMINAR NASIONAL

"Arah Kebijakan OJK Tahun 2025 dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Baru"

4 Februari 2025, Ballroom The Raffles Hotel, Jakarta

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Sekretariat APPI

Kota Kasablanka

(EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D

Telp: (62-21) 2982 0190,

Fax: (62-21) 2982 0191,

Email: sekretariat@ifsa.or.id

Merry Christmas

'Tis the season to be jolly!

BCAfinance

solusi tepat pembiayaan anda

MOBIL IMPIAN CICILAN RINGAN

MINI FOR MAX

TENOR 8 TAHUN

DP 10%

Khusus untuk Mobil Penumpang

BCA Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

☎ Astari 08111027780 🌐 mybcf 🌐 www.bcafinance.co.id